



SEKRETARIAT

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia

Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110

Telp : 021-3912812

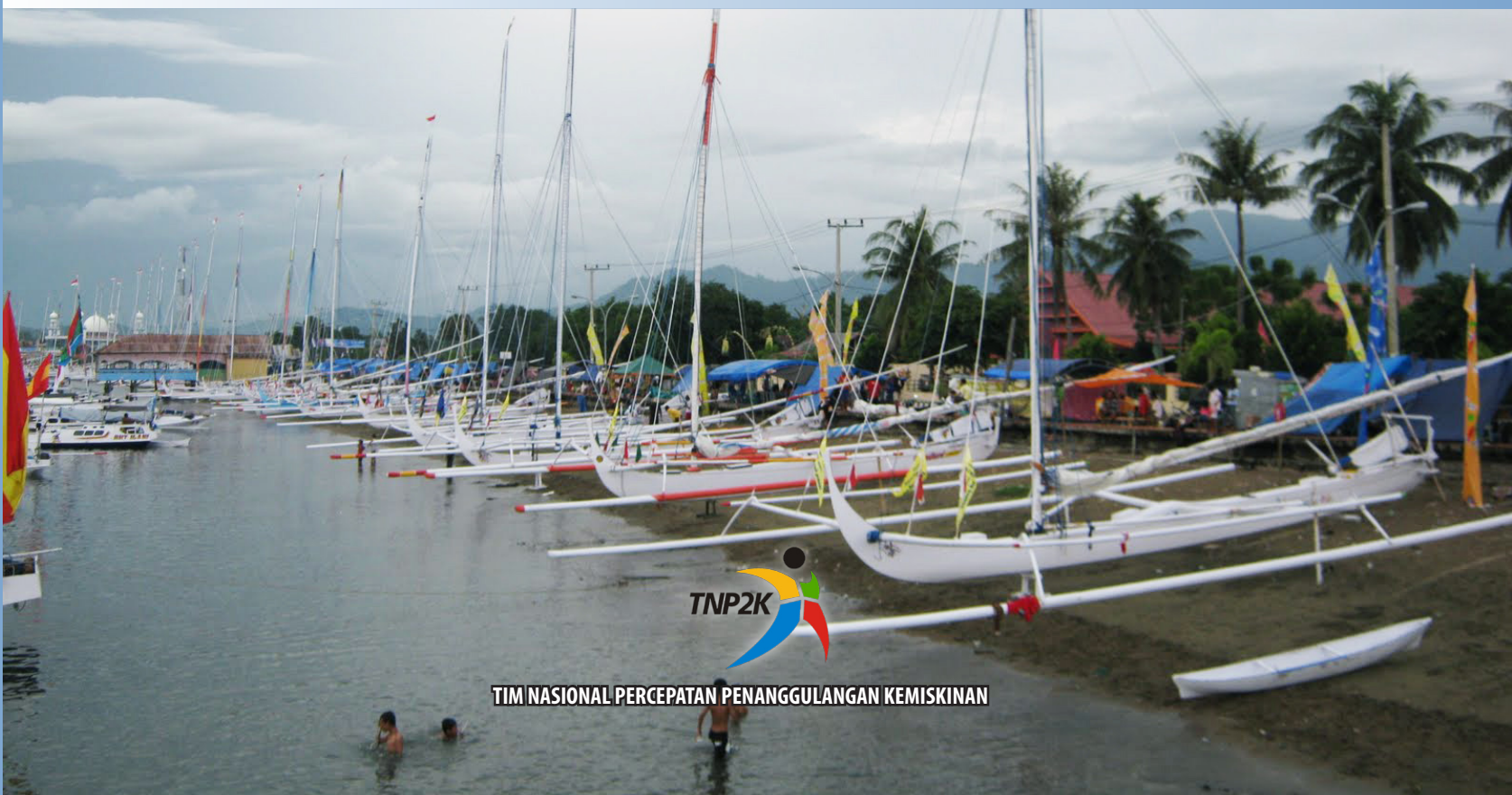
Faks : 021-3912-511 dan 021-391-2513

E-Mail : sekretariat@tnp2k.go.id

Website : www.wapresri.go.id



INDIKATOR KESEJAHTERAAN DAERAH **PROVINSI SULAWESI BARAT**



TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN



SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INDIKATOR KESEJAHTERAAN DAERAH **PROVINSI SULAWESI BARAT**



TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

**Judul: Indikator Kesejahteraan Daerah
Provinsi Sulawesi Barat**

Disusun dan Diterbitkan oleh:
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Cetakan Pertama, November 2011

Hak Cipta dilindungi Undang-undang.
© 2011 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
Foto Cover: panoramio.com, hamyahya.blogspot.com

Korespondensi : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110
Telp. 021-3912812
Fax. 021-3912-511 dan 021-391-2513
E-mail: sekretariat@tnp2k.go.id
Website: www.wapresri.go.id



DAFTAR SINGKATAN

ADHK	: Atas Dasar Harga Konstan
AKB	: Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup
APK	: Angka Partispasi Kasar
APM	: Angka Partisipasi Murni
BLM	: Bantuan Langsung Masyarakat
BPS	: Badan Pusat Statistik
CFSI	: <i>Composite Food Security Index</i>
DKP	: Dewan Ketahanan Pangan
FIA	: <i>Food Insecurity Atlas</i>
FSVA	: <i>Food Security and Vulnerability Atlas</i>
HDI	: <i>Human Development Index</i>
IPKM	: Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
KUR	: Kredit Usaha Rakyat
MA	: Madrasah Aliyah
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MTS	: Madrasah Tsanawiyah
NTP	: Nilai Tukar Petani
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Riskesdas	: Riset Kesehatan Dasar
SAKERNAS	: Survey Angkatan Kerja Nasional
SD	: Sekolah Dasar
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SUSENAS	: Survey Sosial Ekonomi Nasional
TNP2K	: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
WFP	: <i>World Food Programme</i>



DAFTAR ISI

Daftar Singkatan.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar.....	vi
Pertumbuhan Ekonomi.....	1
Inflasi.....	4
Nilai Tukar Petani.....	5
Tingkat Kemiskinan	6
Indikator Kemiskinan	7
Program Penanggulangan Kemiskinan	8
Tingkat Pengangguran dan Ketenagakerjaan.....	9
Bidang Kesehatan	11
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat.....	15
Bidang Pendidikan.....	17
Akses Terhadap Air Bersih	19
Akses Terhadap Sanitasi.....	20
Indeks Pembangunan Manusia.....	21
Komponen Indeks Pembangunan Manusia	22
Ketahanan Pangan.....	23
Prioritas Bidang Pendidikan	26
Prioritas Bidang Kesehatan.....	29
Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar	31
Prioritas Bidang Ketenagakerjaan	34
Bidang-Bidang Prioritas Kesejahteraan Rakyat	35
PNPM Mandiri.....	36
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	38
Anggaran Pembangunan Daerah	41



DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2008 – 2010
- Tabel 2. Distribusi Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama, Tahun 2008 – 2010 (Jiwa)
- Tabel 3. Kontribusi Masing-masing Sektor Terhadap PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja, Tahun 2008-2010 (Persen)
- Tabel 4. Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009-2010
- Tabel 5. Indikator Ketenagakerjaan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009 dan 2010
- Tabel 6. Indikator Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Tabel 7. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Tabel 8. Indikator Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Tabel 9. Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2008 - 2009
- Tabel 10. Komponen Indeks Komposit Ketahanan Pangan, Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Tabel 11. Prioritas Intervensi Menurut Kabupaten Kota
- Tabel 12. Komposisi BLM PNPM Mandiri Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2011

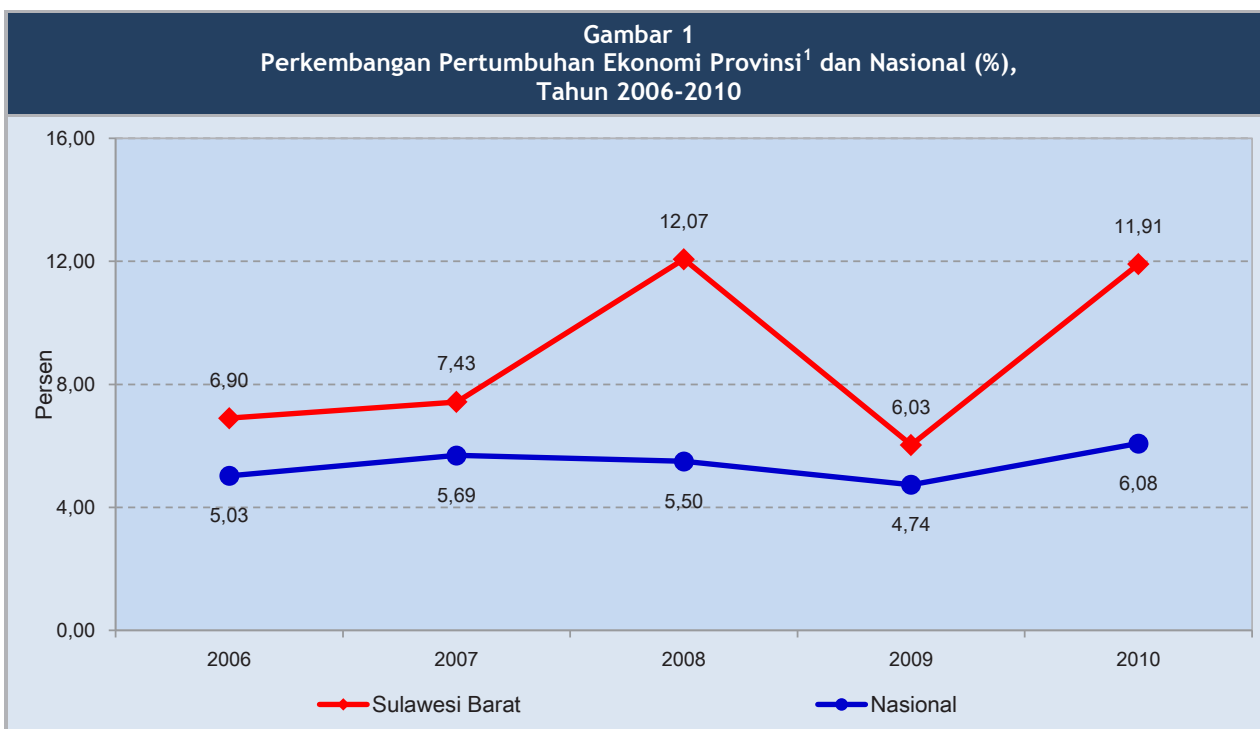


DAFTAR GAMBAR

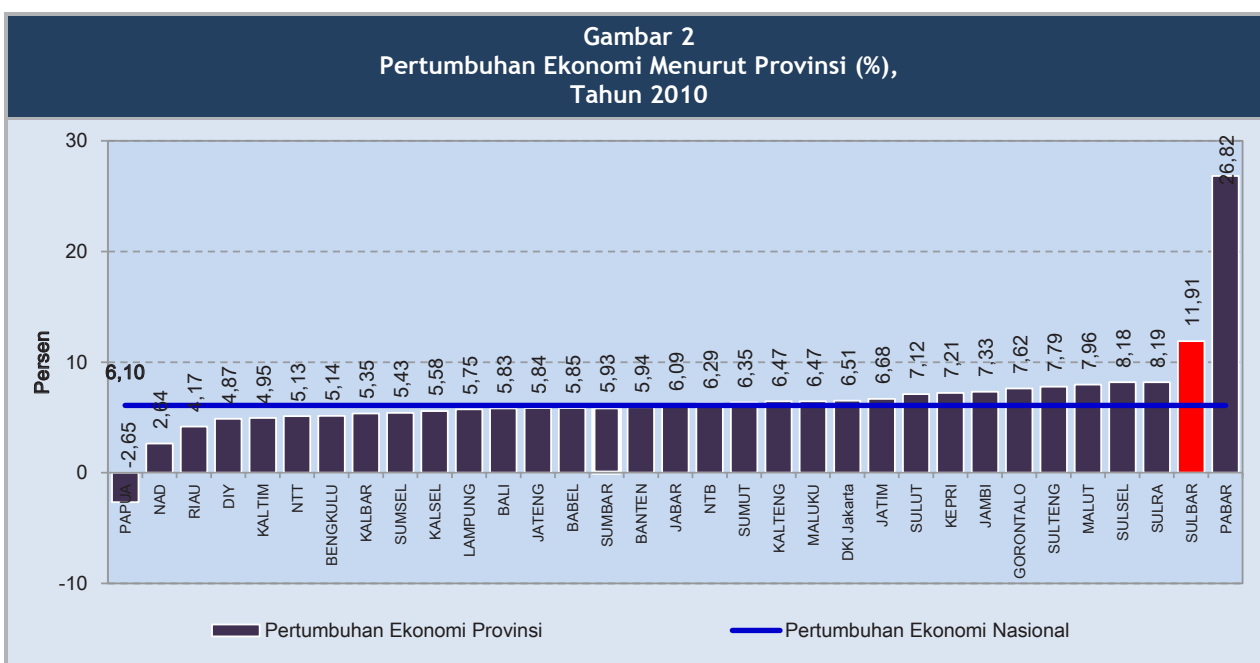
- Gambar 1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Nasional (%), Tahun 2006-2010
- Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi (%), Tahun 2010
- Gambar 3. Rata-rata Upah/Gaji/Pendapatan Buruh/Karyawan/Pegawai Sebulan Menurut Provinsi, Tahun 2010
- Gambar 4. Perkembangan Inflasi Tahunan (Year-on-Year) Provinsi Sulawesi Barat (%), Tahun 2010-2011
- Gambar 5. Inflasi Tahunan (Year-on-Year) Menurut 66 Kota Besar di Masing-masing Provinsi (%), (Bulan Juli 2011)
- Gambar 6. Perkembangan Nilai Tukar Petani (Year-on-Year) Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2008-2011
- Gambar 7. Nilai Tukar Petani Menurut Provinsi (%), Bulan Juli 2011
- Gambar 8. Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi (%), Tahun 2010
- Gambar 9. Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2010
- Gambar 10. Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2010 dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun 2011 Menurut Kabupaten Kota
- Gambar 11. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi (%), Tahun 2010
- Gambar 12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2010
- Gambar 13. Persentase Balita Kekurangan Gizi Menurut Provinsi, Tahun 2010
- Gambar 14. Persentase Balita Kekurangan Gizi Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2007
- Gambar 15. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Provinsi (Jiwa), Tahun 2009
- Gambar 16. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa), Tahun 2009
- Gambar 17. Persentase Kelahiran Ditolong oleh Tenaga Medis Menurut Provinsi, Tahun 2009
- Gambar 18. Persentase Kelahiran Ditolong oleh Tenaga Medis Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Gambar 19. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Tahun 2009
- Gambar 20. Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun Menurut Provinsi (%), Tahun 2009
- Gambar 21. Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2009
- Gambar 22. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Air Bersih Menurut Provinsi (%), Tahun 2009
- Gambar 23. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Air Bersih Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2009
- Gambar 24. Proporsi Rumah Tangga Tanpa Akses Sanitasi Menurut Provinsi (%), Tahun 2009

- Gambar 25. Proporsi Rumah Tangga Tanpa Akses Sanitasi Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2009
- Gambar 26. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, Tahun 2009
- Gambar 27. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Gambar 28. Konsumsi Normatif terhadap Produksi Bersih Serealia per Kapita Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Gambar 29. Peta Kerentanan Terhadap Kerawanan Pangan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Gambar 30. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Penurunan Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun
- Gambar 31. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Peningkatan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI)
- Gambar 32. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Peningkatan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Menengah Pertama
- Gambar 33. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Penurunan Angka Kematian Bayi
- Gambar 34. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Penurunan Prevalensi Balita Kekurangan Gizi
- Gambar 35. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Akses Terhadap Air Bersih
- Gambar 36. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Akses Terhadap Sanitasi
- Gambar 37. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Akses Terhadap Listrik
- Gambar 38. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja
- Gambar 39. Komposisi BLM PNPM Mandiri Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2011
- Gambar 40. Perkembangan Rencana, Realisasi Penyaluran Kredit dan Jumlah Debitur KUR di Provinsi Sulawesi Barat, 2010 - 2011
- Gambar 41. Perkembangan Rencana, Realisasi Penyaluran Kredit dan Jumlah Debitur KUR Nasional, 2010 - 2011
- Gambar 42. Jumlah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang Terserap Menurut Provinsi (Per 31 Juli 2011)
- Gambar 43. Jumlah Kredit Terserap Per-Debitur Menurut Provinsi (Per 31 Juli 2011)
- Gambar 44. Jumlah Kredit Terserap Per-Debitur Menurut Bank Penyalur (Juta Rupiah) (Per 31 Juli 2011)
- Gambar 45. Komposisi Kredit yang Terserap Menurut Bank Penyalur Provinsi Sulawesi Barat (Juta Rupiah) (Per 31 Juli 2011)
- Gambar 46. Komposisi Alokasi Belanja Daerah Menurut Fungsi, Provinsi Sulawesi Barat (Juta Rupiah), Tahun 2010
- Gambar 47. Komposisi Alokasi Belanja Daerah Menurut Fungsi dan Kabupaten/Kota, Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2010

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

¹ Pertumbuhan ekonomi tahun 2009 merupakan angka sementara dan tahun 2010 merupakan angka sangat sementara.

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Tabel 1.
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2008 - 2010

LAPANGAN USAHA	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)			PDRB Atas Dasar Harga Konstan ADHK 2000 (Miliar Rupiah)			Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2000 (Persen)	
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2009	2010
Pertanian	3920,38	4196,3	5.469,73	1916,59	1.972,23	2.243,73	2,90	14,55
Pertambangan Dan Penggalian	56,49	67,77	95,63	27,79	32,69	44,12	17,62	1,56
Industri Pengolahan	585,62	617,38	796,39	293,04	314,35	417,09	7,27	15,47
Listrik, Gas & Air Bersih	33,22	37,16	48,07	16,41	18,2	23,11	10,91	26,96
Bangunan	357	402,53	453,04	176,76	191,71	220,87	8,46	-2,85
Perdagangan, Hotel & Restoran	979,92	1132,95	1.429,66	501,31	535,7	602,01	6,86	13,87
Pengangkutan & Komunikasi	200,83	237,1	233,98	118,06	128,8	162,57	9,10	21,29
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	389,51	477,29	668,66	233,94	264,54	329,29	13,08	5,04
Jasa - Jasa	1255,03	1503,34	1.791,45	588,31	647,81	701,51	10,05	7,22
Produk Domestik Regional Bruto	7.778,00	8.671,82	10.986,61	3.872,21	4.106,03	4.744,30	6,04	11,91

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

Tabel 2.
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama, Tahun 2008-2010 (Jiwa)

LAPANGAN USAHA	2008	2009	2009	2010	2010
	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Pertanian	305.968	296.433	300.357	323.361	320.181
Industri Pengolahan	25.443	20.645	31.058	34.848	29.414
Bangunan	13.479	18.077	16.734	16.259	14.864
Perdagangan, Hotel & Restoran	61.594	67.293	62.981	73.683	64.463
Pengangkutan & Komunikasi	16.554	16.255	15.856	9.638	15.907
Jasa - Jasa	45.700	66.737	56.879	59.739	65.704
Lainnya*	4.571	4.994	4.215	6.232	4.334
Jumlah	473.309	490.434	488.080	523.760	514.867

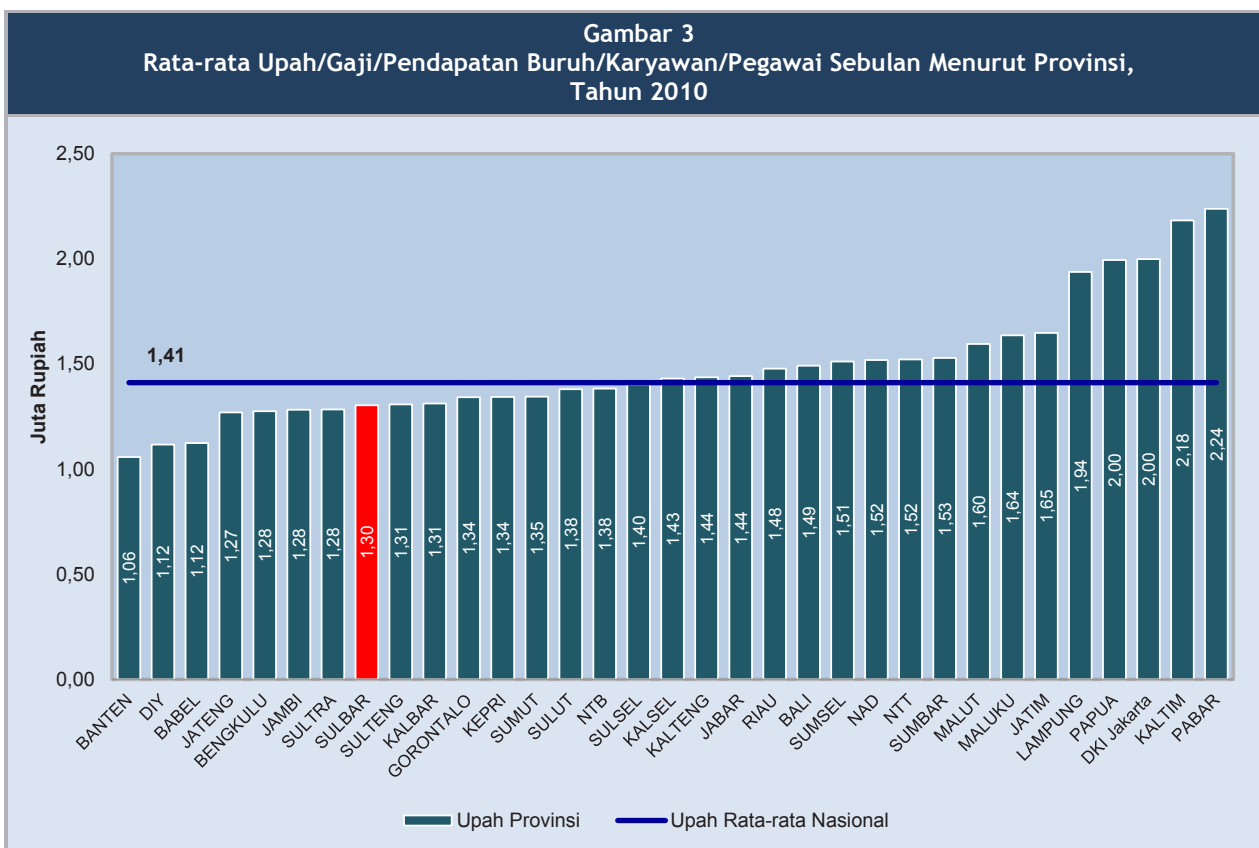
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Tabel 3.
Kontribusi Masing-masing Sektor Terhadap PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja, Tahun 2008-2010 (Persen)

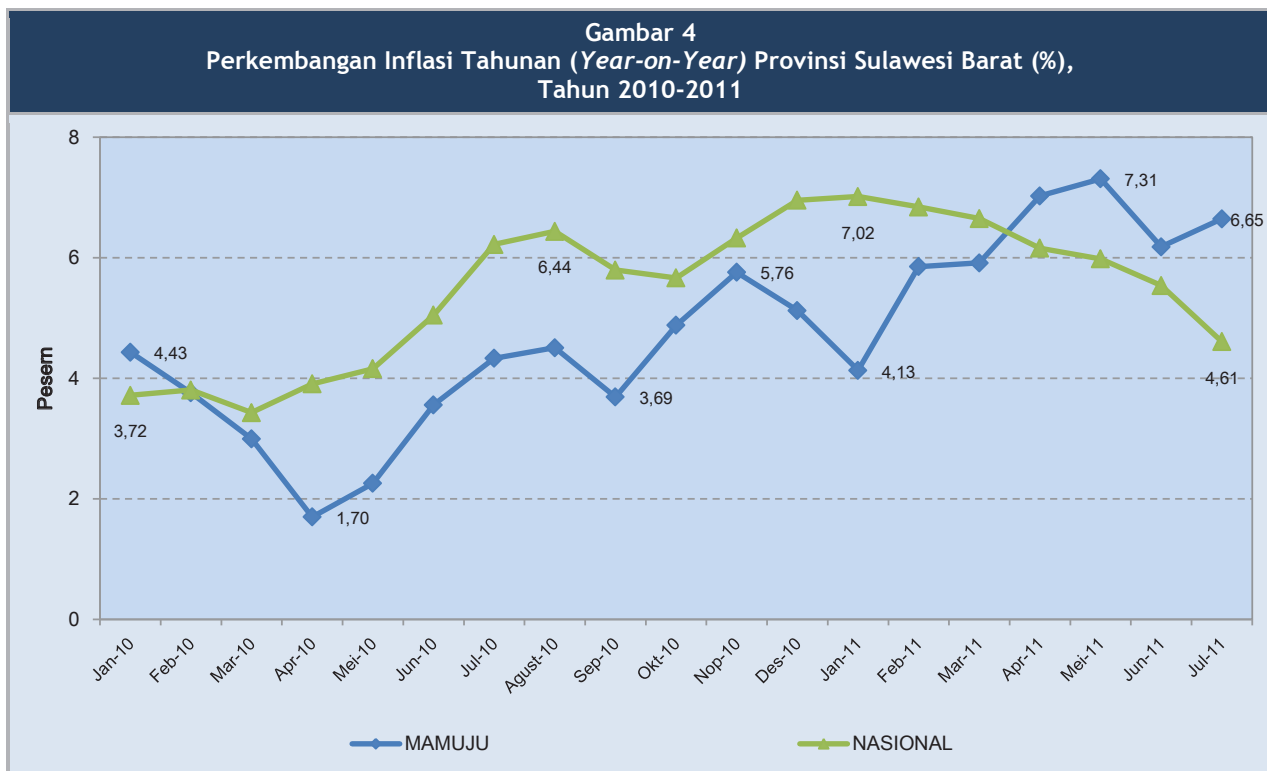
LAPANGAN USAHA	Distribusi PDRB (ADHK 2000)			Distribusi Tenaga Kerja		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Pertanian	49,50	48,03	47,29	64,64	61,54	62,19
Industri Pengolahan	7,57	7,66	8,79	5,38	6,36	5,71
Bangunan	4,56	4,67	4,66	2,85	3,43	2,89
Perdagangan. Hotel & Restoran	12,95	13,05	12,69	13,01	12,90	12,52
Pengangkutan & Komunikasi	3,05	3,14	3,43	3,50	3,25	3,09
Jasa - Jasa	15,19	15,78	14,79	9,66	11,65	12,76
Lainnya*	7,18	7,68	8,36	0,97	0,86	0,84

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

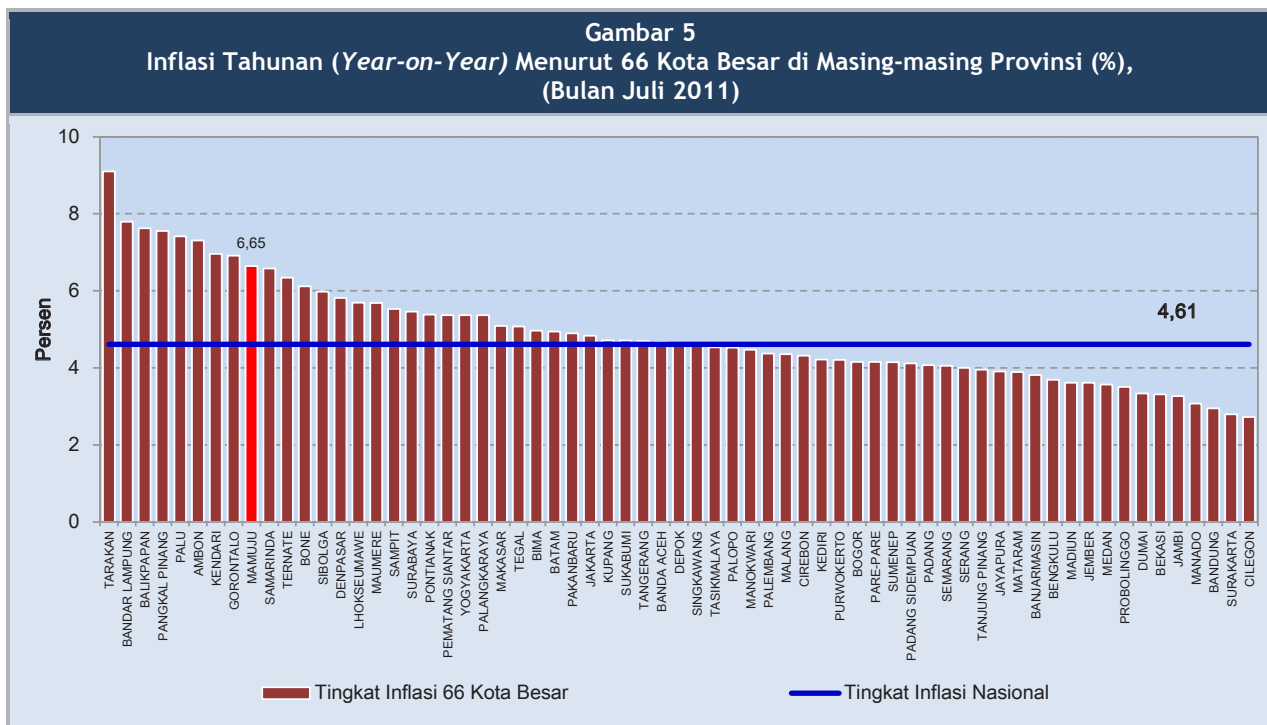


Sumber: Keadaan Pekerja di Indonesia, BPS 2011

INFLASI

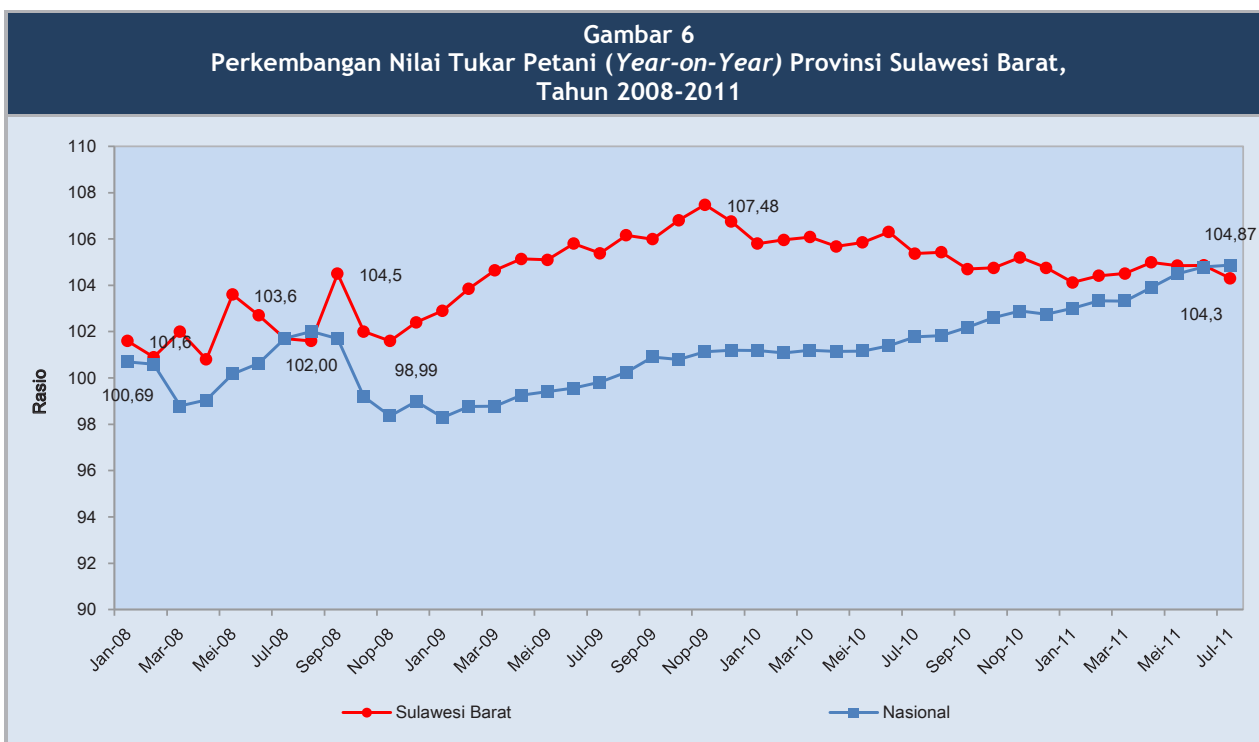


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

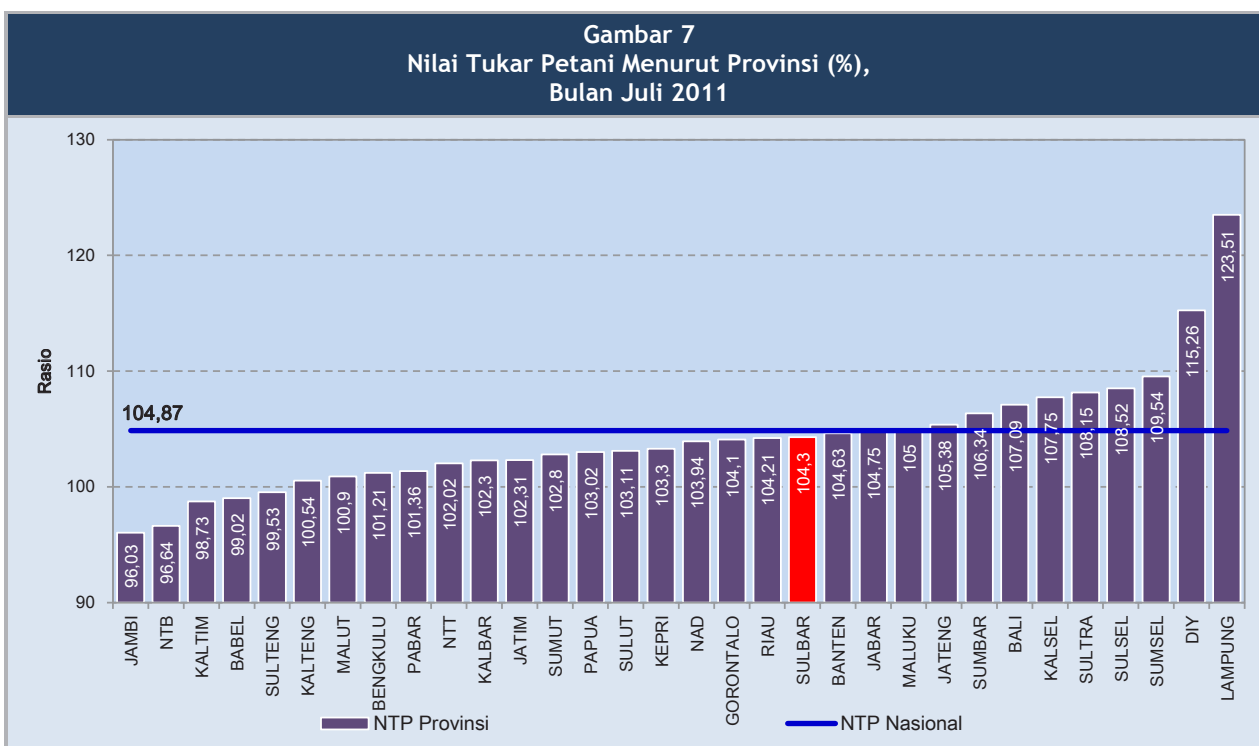


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

NILAI TUKAR PETANI

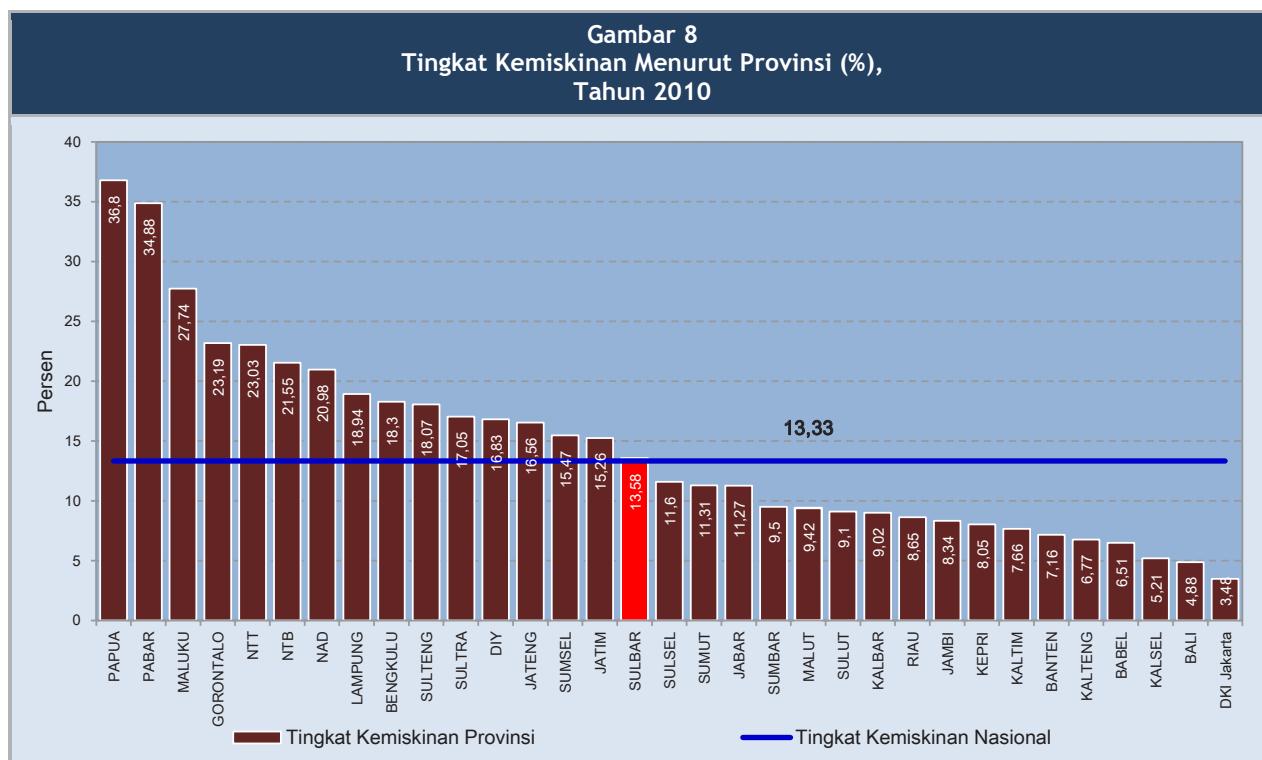


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

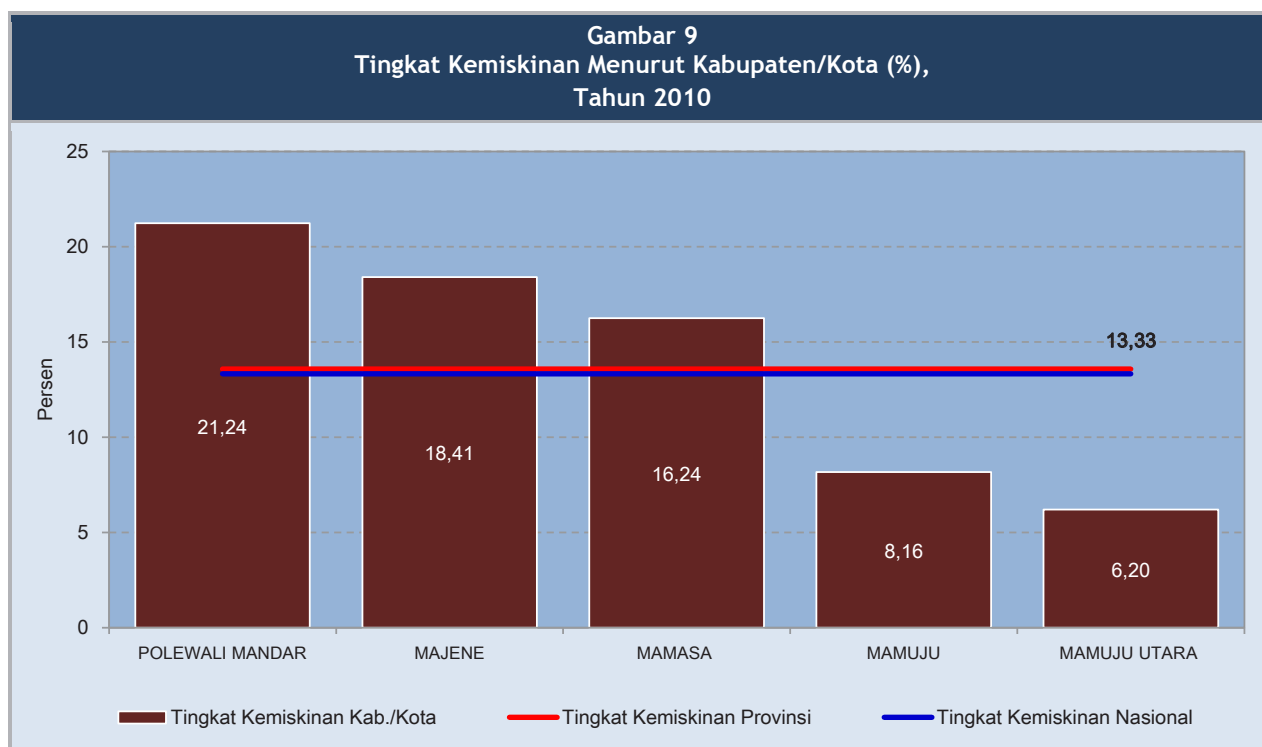


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

TINGKAT KEMISKINAN



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

INDIKATOR KEMISKINAN

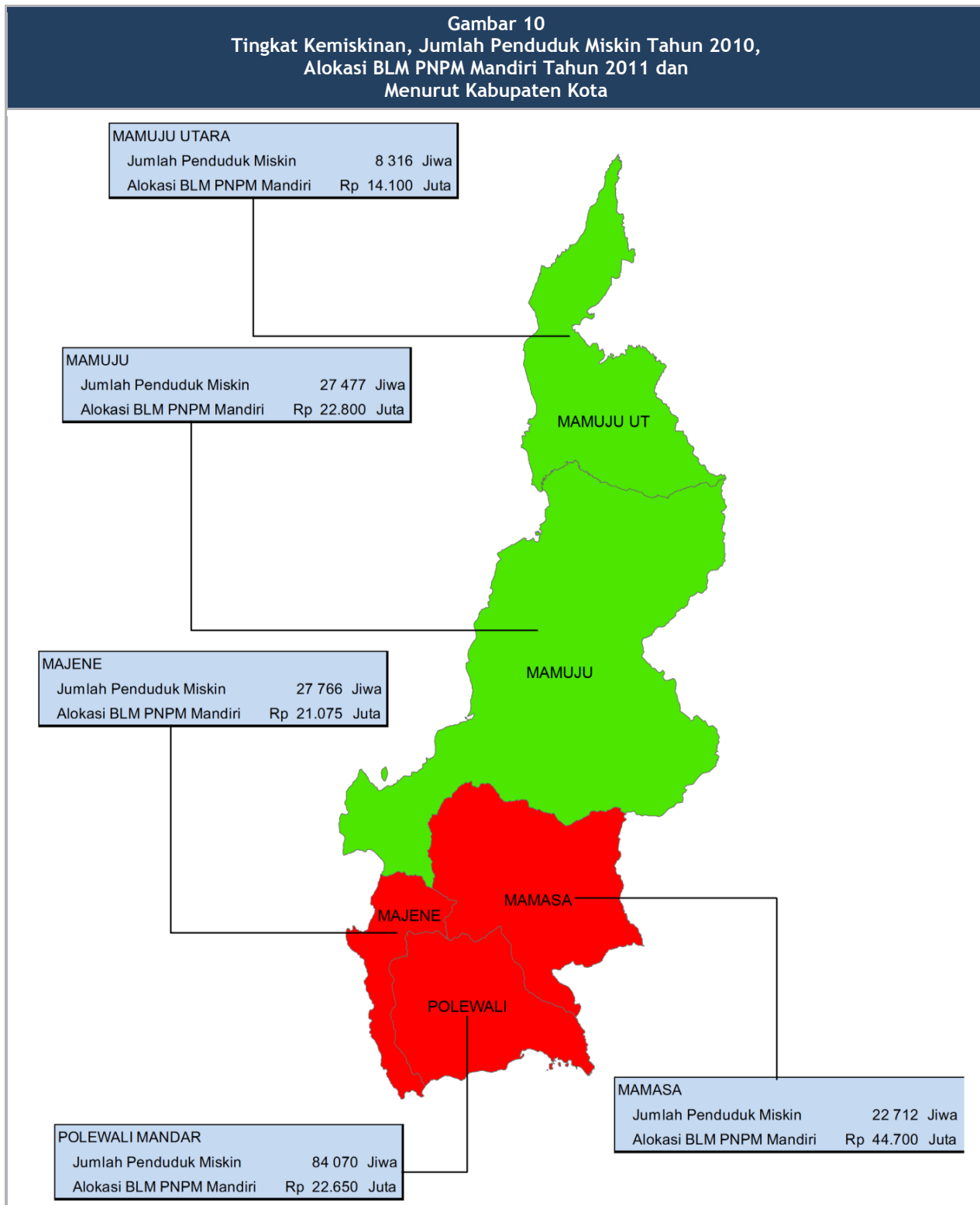
Tabel 4.
Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009-2010

Daerah	Garis Kemiskinan (Rp/Bulan)		Presentase Penduduk Miskin (%)		Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
MAJENE	204 699	220 059	18,09	18,41	23 855	27 766
POLEWALI MANDAR	213 942	229 996	21,37	21,24	76 578	84 070
MAMASA	158 068	169 929	17,87	16,24	22 315	22 712
MAMUJU	147 699	158 782	8,13	8,16	25 405	27 477
MAMUJU UTARA	197 015	211 799	6,47	6,20	7 137	8 316
SULAWESI BARAT	163 224	171 356	15,29	13,58	155 290	170 341
INDONESIA	200 262	211 726	14,15	13,33	32.530.000	31.023.390

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan hasil Susenas Kor Juli 2010)

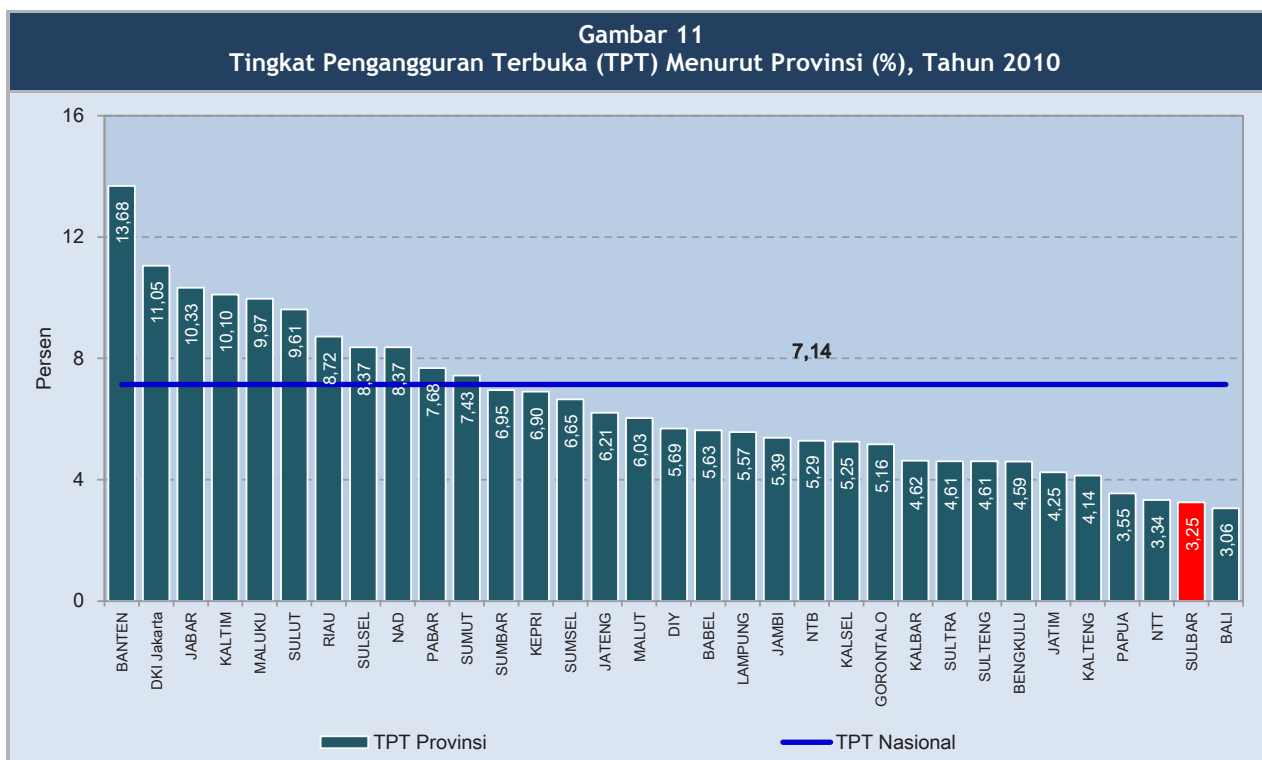
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Gambar 10
Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2010,
Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun 2011 dan
Menurut Kabupaten Kota

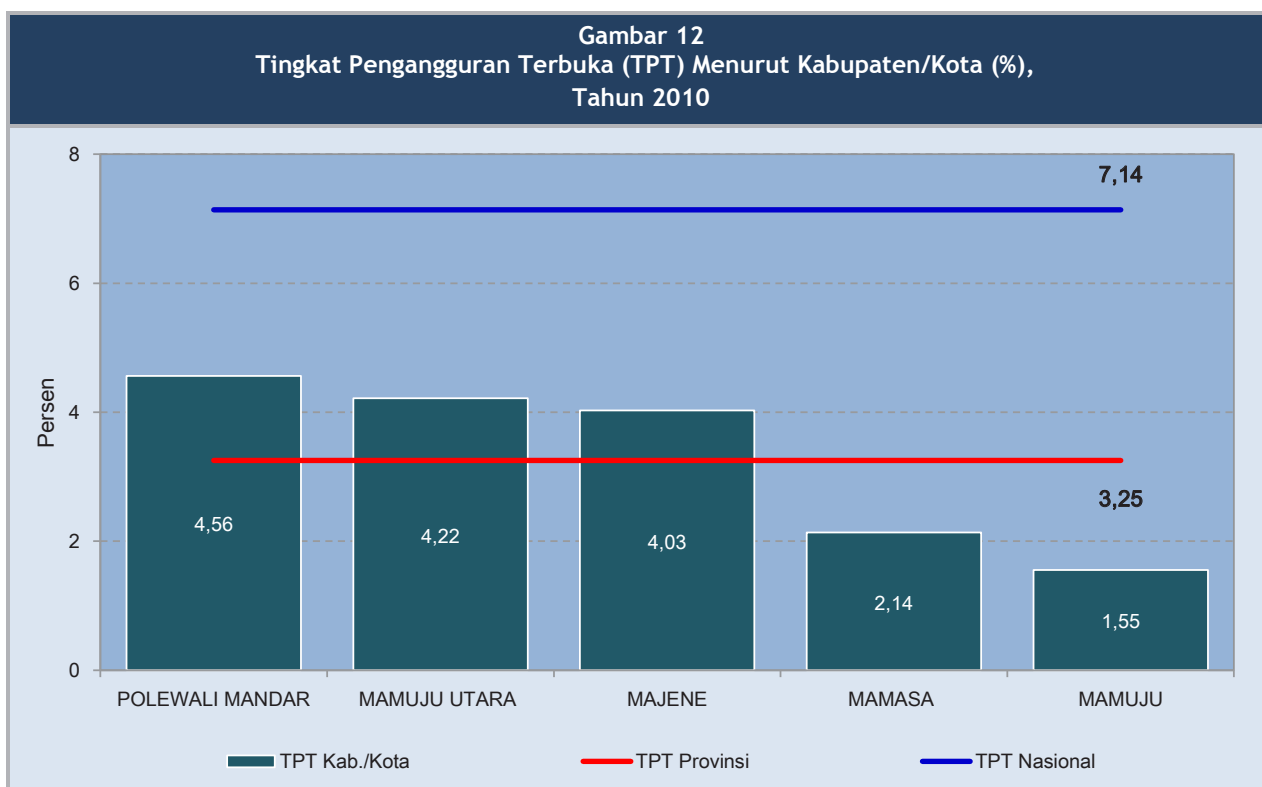


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011
 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2011

TINGKAT PENGANGGURAN DAN KETENAGAKERJAAN



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan Hasil Sakernas Agustus 2010)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan Hasil Sakernas Agustus 2010)

TINGKAT PENGANGGURAN DAN KETENAGAKERJAAN

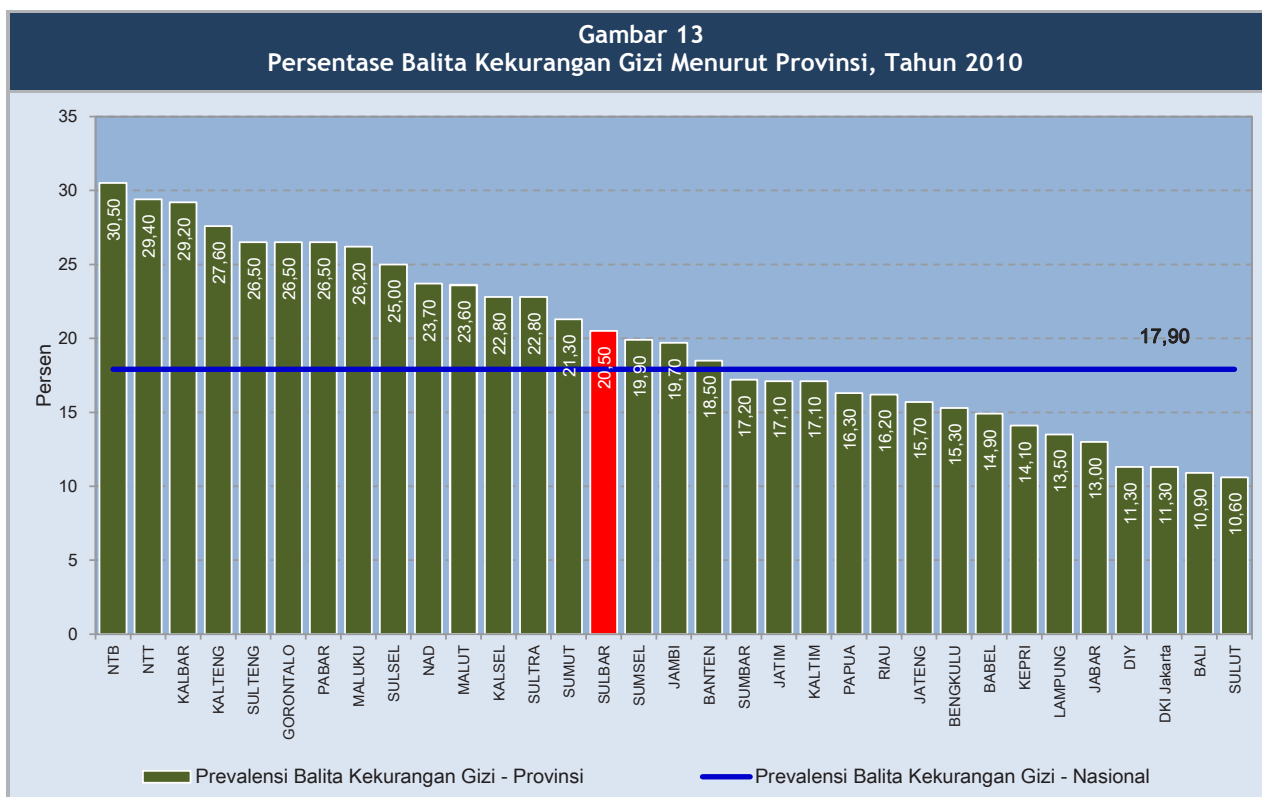
Tabel 5.
Indikator Ketenagakerjaan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009 dan 2010

Daerah	Angka Partisipasi Angkatan Kerja		Pekerja yang Bekerja Selama Kurang dari 14 Jam Seminggu		Pekerja yang Bekerja Selama Kurang dari 35 Jam Seminggu		Pekerja di Sektor Informal	
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
MAJENE	59,36	67,31	5,57	11,90	30,71	45,42	54,73	56,88
POLEWALI MANDAR	67,75	68,85	9,46	13,21	43,33	51,93	72,13	77,38
MAMASA	77,08	76,78	10,61	10,74	54,89	69,19	85,84	84,49
MAMUJU	68,40	74,58	9,12	11,49	39,51	52,19	73,21	76,55
MAMUJU UTARA	68,73	70,92	10,14	13,57	46,68	55,70	64,36	64,18
SULAWESI BARAT	68,07	71,46	9,14	12,25	42,94	53,83	71,47	74,06
NASIONAL	67,23	67,72	4,29	4,11	30,10	30,75	61,56	58,96

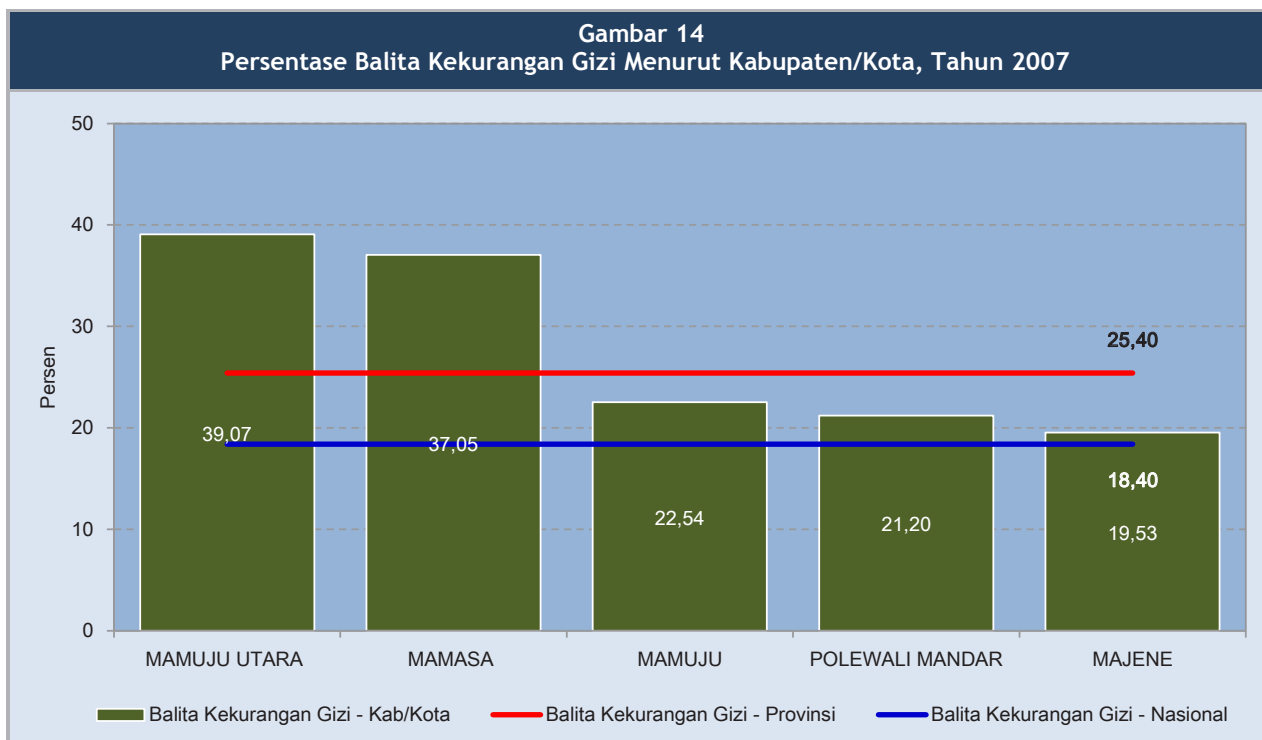
Keterangan: Daerah Pemekaran, Data Belum Tersedia.

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan Hasil Sakernas Agustus 2010)

BIDANG KESEHATAN

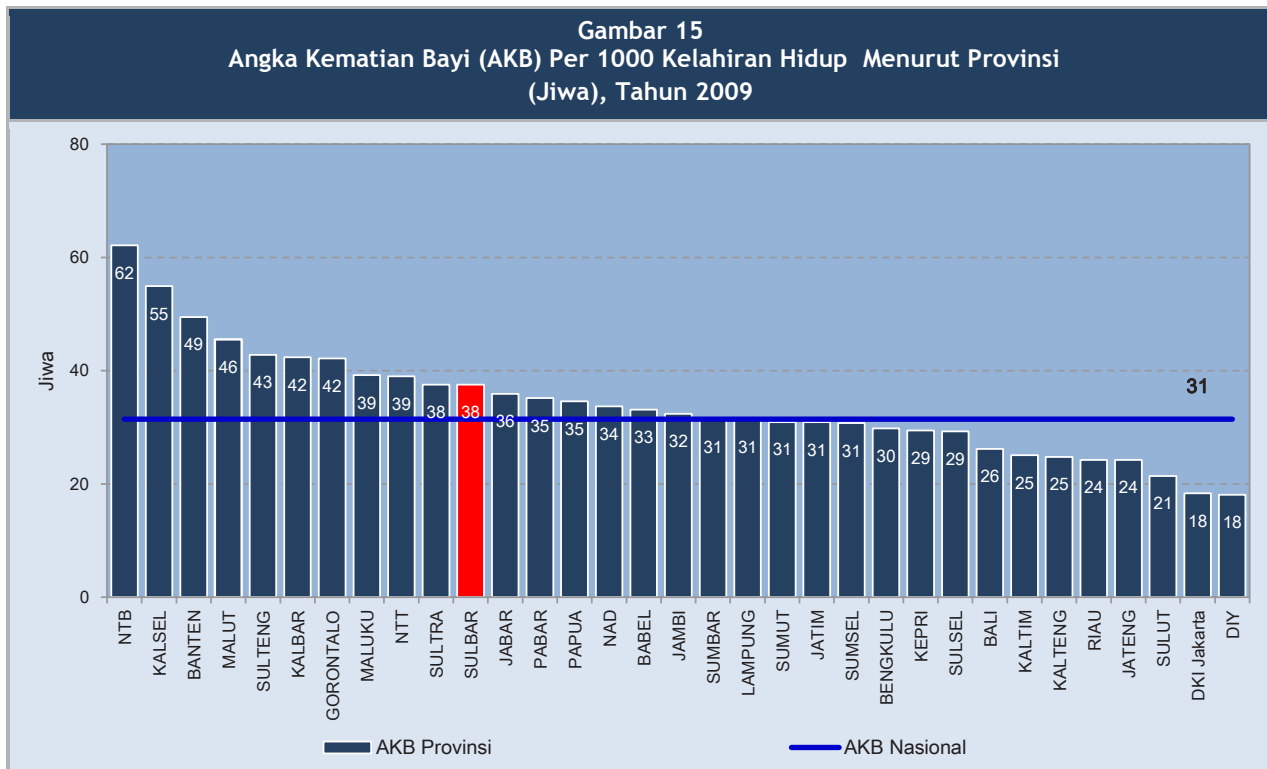


Sumber: Riset Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan 2010

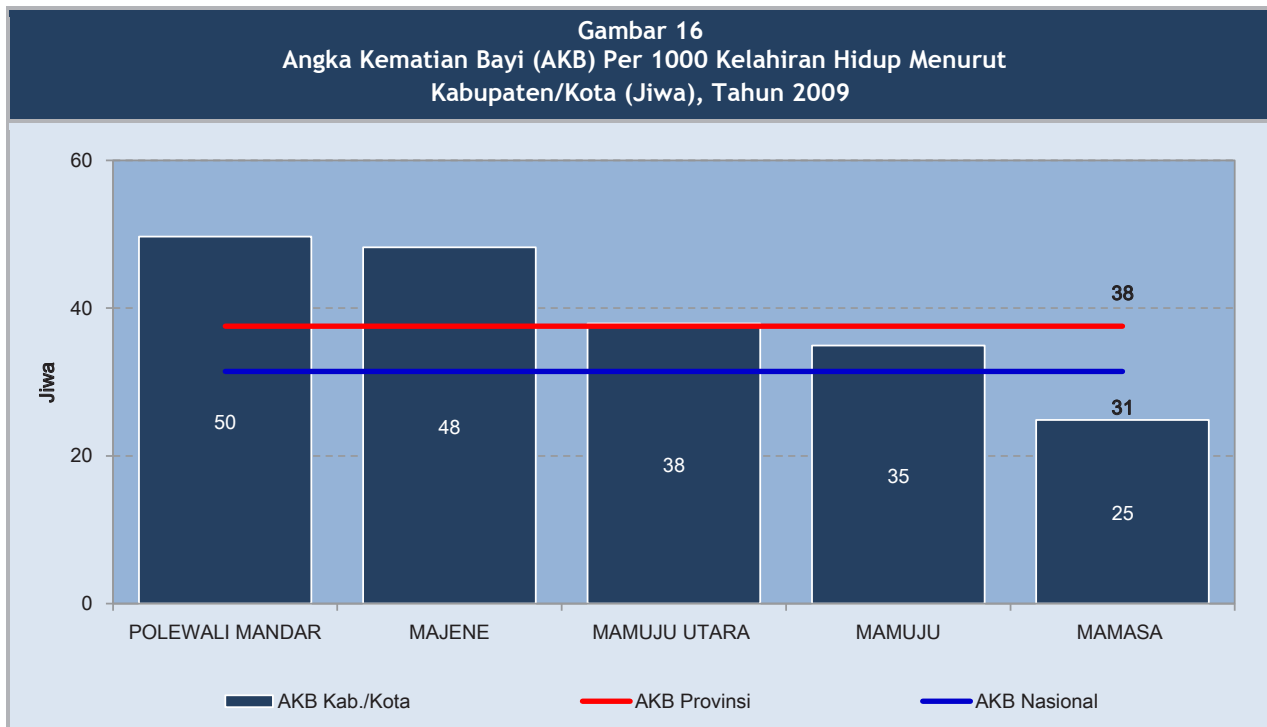


Sumber: Riset Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan 2007

BIDANG KESEHATAN

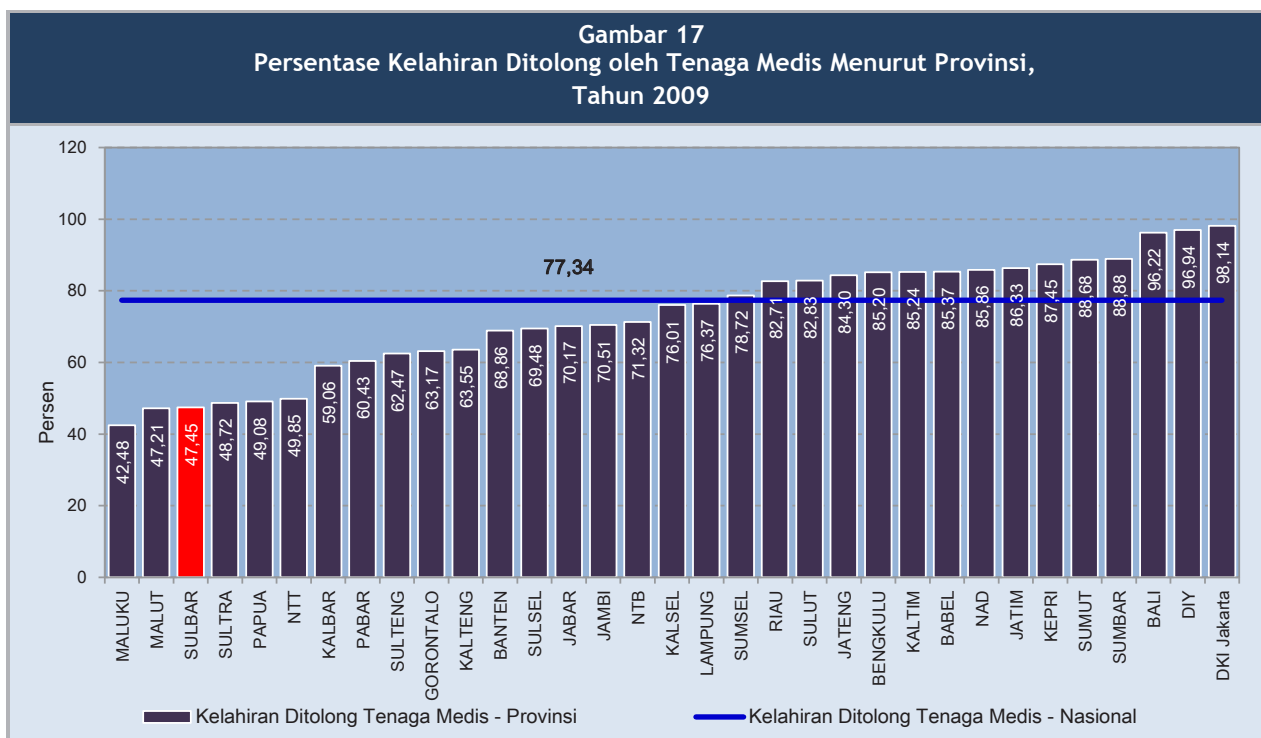


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

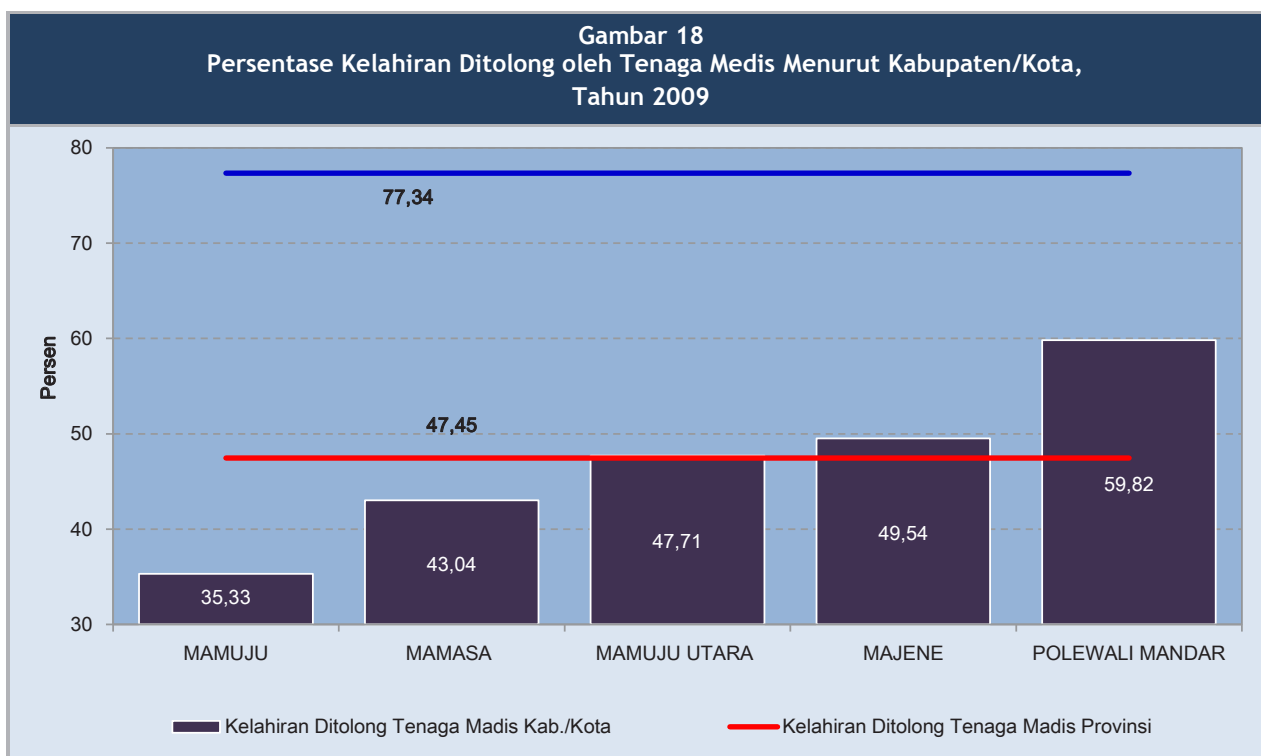


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

BIDANG KESEHATAN



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

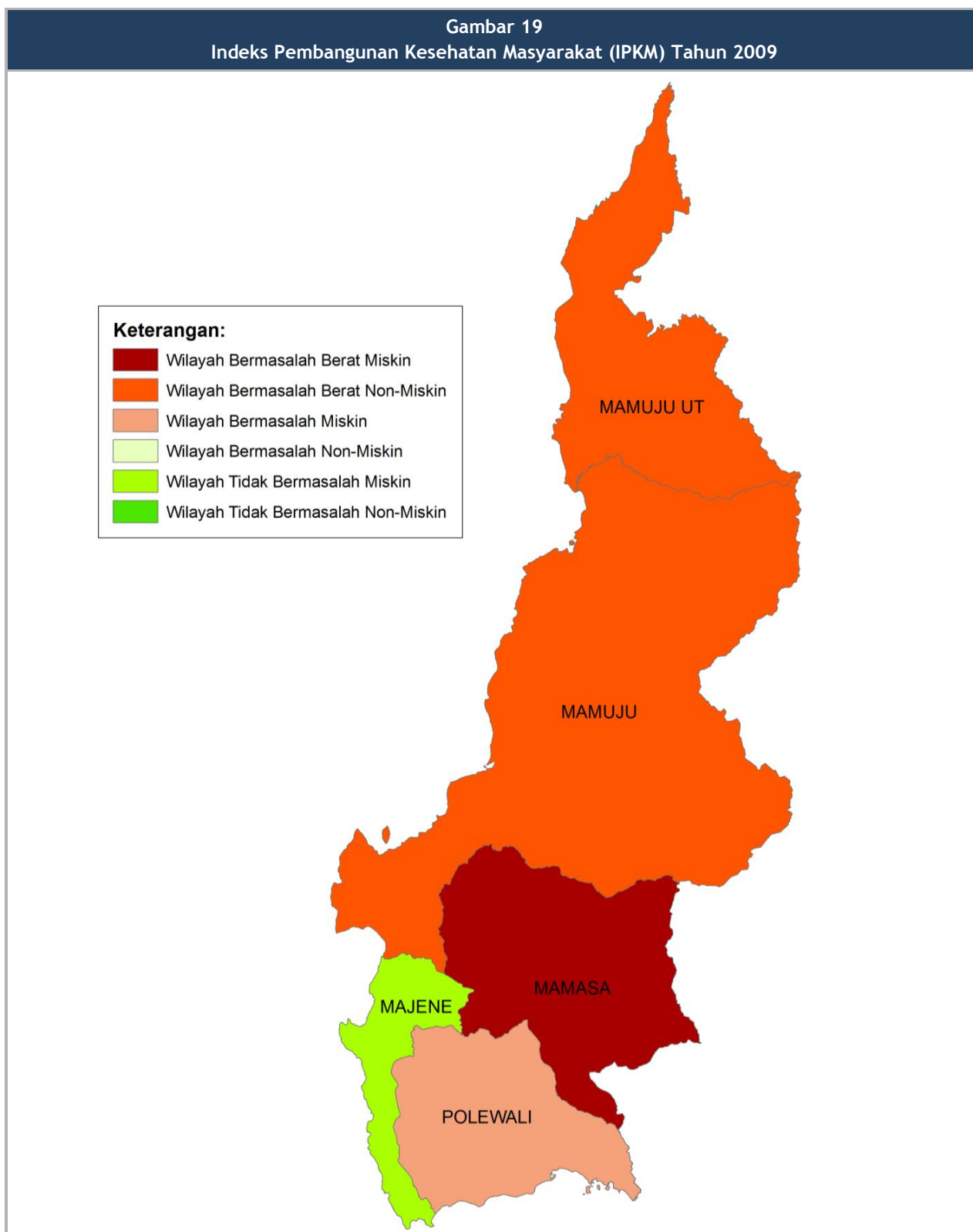
BIDANG KESEHATAN

Tabel 6.
Indikator Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Daerah	Penduduk dengan keluhan kesehatan	Angka Morbiditas	Rata-rata Lama Sakit	Penduduk yg Melakukan Pengobatan Sendiri
	(%)	(%)	(%)	(%)
MAJENE	28,56	14,62	5,68	64,22
POLEWALI MANDAR	34,77	21,27	6,75	70,64
MAMASA	36,44	20,96	6,07	58,33
MAMUJU	43,95	26,25	5,95	71,38
MAMUJU UTARA	45,44	34,03	4,79	92,92
SULAWESI BARAT	38,08	23,24	6,02	71,69
INDONESIA	33,68	18,63	5,51	68,41

Keterangan: Daerah Pemekaran, Data Belum Tersedia.
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

INDEKS PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT



Sumber: Kementerian Kesehatan, 2010

INDEKS PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT

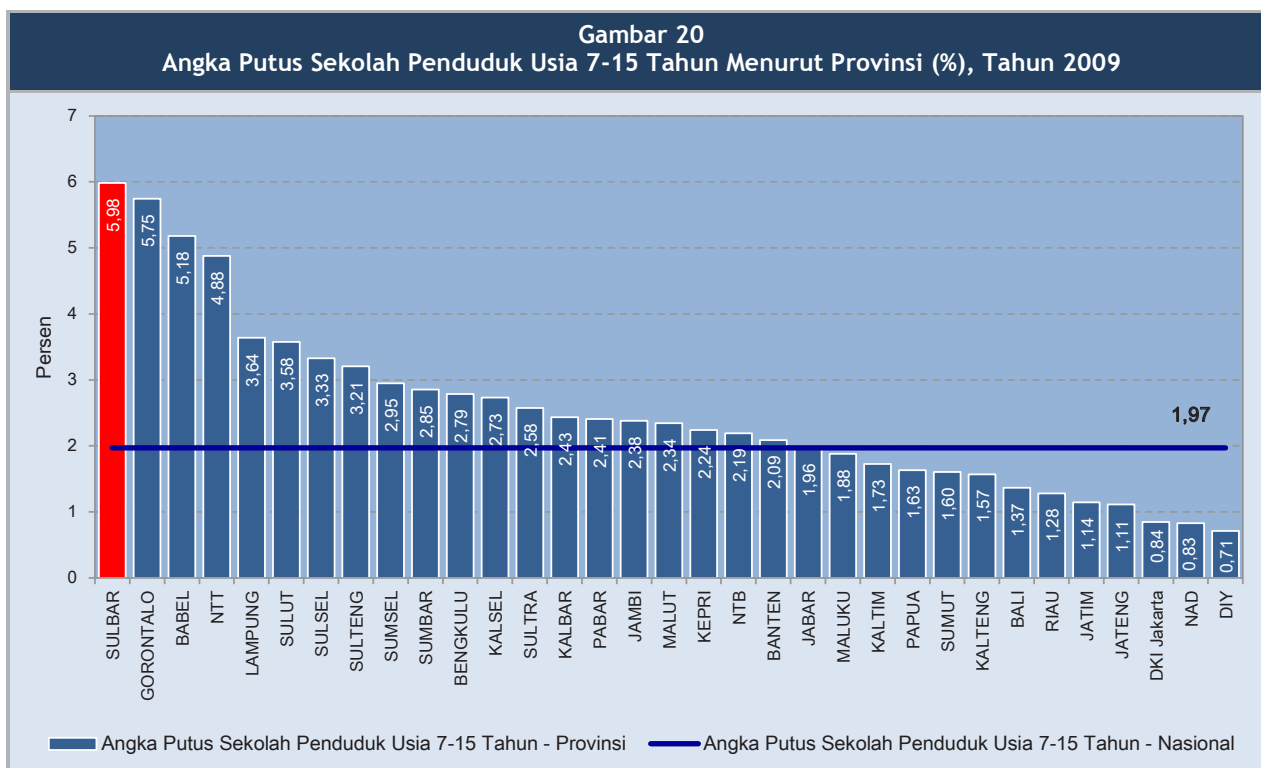
Tabel 7.
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)² Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Kabupaten/Kota	Kategori Wilayah	IPKM		Keterangan
		Rangking	Nilai	
MAMASA	KaA	430	0,30	Kabupaten Bermasalah Berat Miskin
MAMUJU	KaB	412	0,37	Kabupaten Bermasalah Berat Non Miskin
MAMUJU UTARA	KaB	405	0,38	Kabupaten Bermasalah Berat Non Miskin
POLEWALI MANDAR	KaC	322	0,45	Kabupaten Bermasalah Miskin
MAJENE	KaE	221	0,51	Kabupaten Tidak Bermasalah Miskin

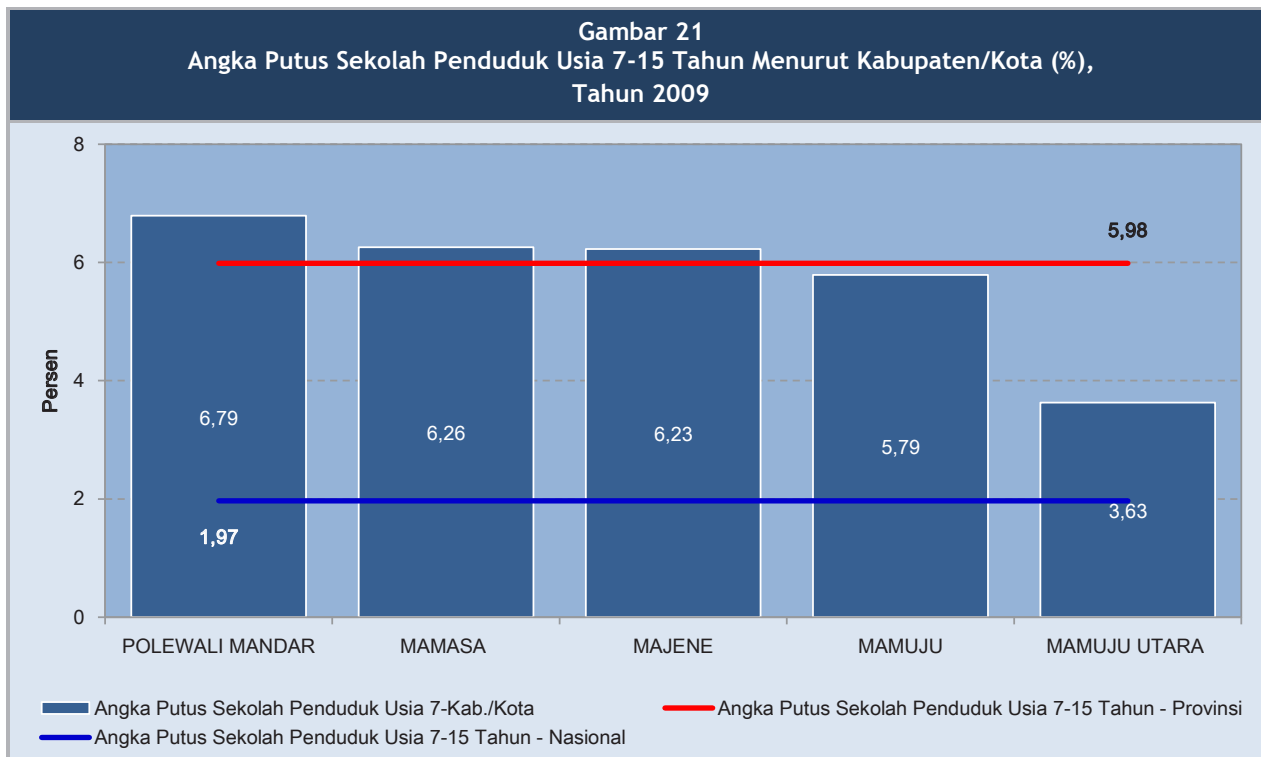
Sumber: Kementerian Kesehatan, 2010

² IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat) adalah indikator komposit yang dirumuskan dari 24 indikator kesehatan dan dirumuskan dari data kesehatan berbasis komunitas yaitu: Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar); Susenas (Survei Ekonomi Nasional); dan Survei Podes (Potensi Desa). IPKM digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan pada bidang kesehatan dan mendukung efektivitas intervensi pada bidang kesehatan.

BIDANG PENDIDIKAN



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



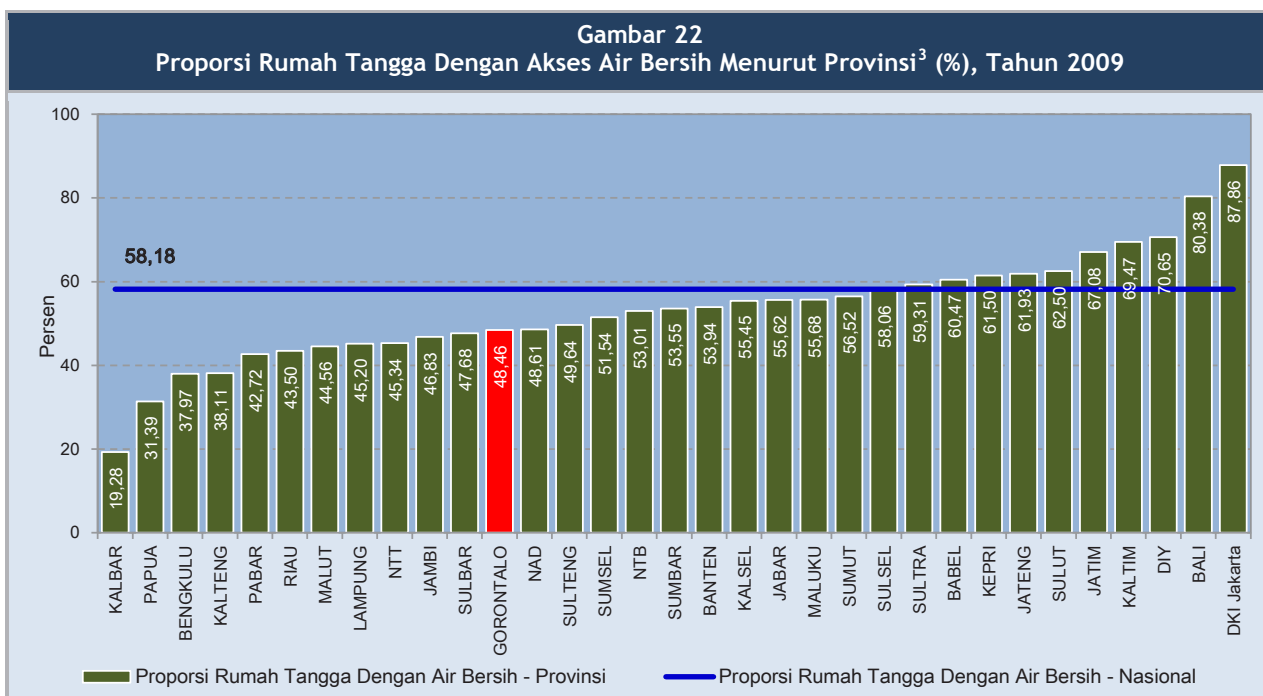
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

Tabel 8.
Indikator Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

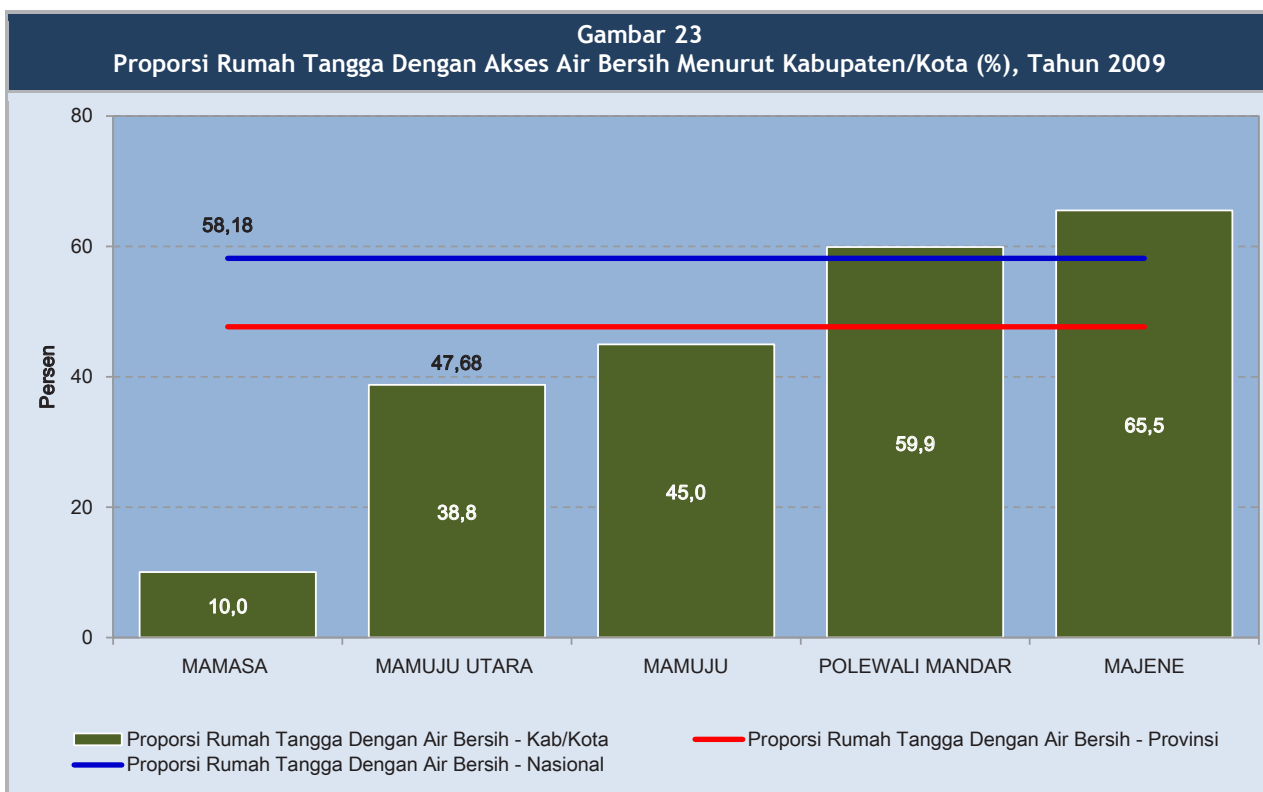
Daerah	Angka Partisipasi Pendidikan					
	Sekolah Dasar (SD/MI)		Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)		Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK)	
	APK	APM	APK	APM	APK	APM
MAJENE	113,08	92,34	70,10	60,39	62,92	44,01
POLEWALI MANDAR	113,29	92,37	55,78	46,29	47,51	29,05
MAMASA	114,62	94,74	76,22	57,65	53,11	36,25
MAMUJU	110,93	92,92	72,92	54,11	52,70	32,93
MAMUJU UTARA	112,82	91,39	77,99	58,36	47,52	31,67
SULAWESI BARAT	112,63	92,77	68,00	53,35	51,91	33,41
INDONESIA	110,42	94,37	81,25	67,43	62,55	45,11

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

AKSES TERHADAP AIR BERSIH



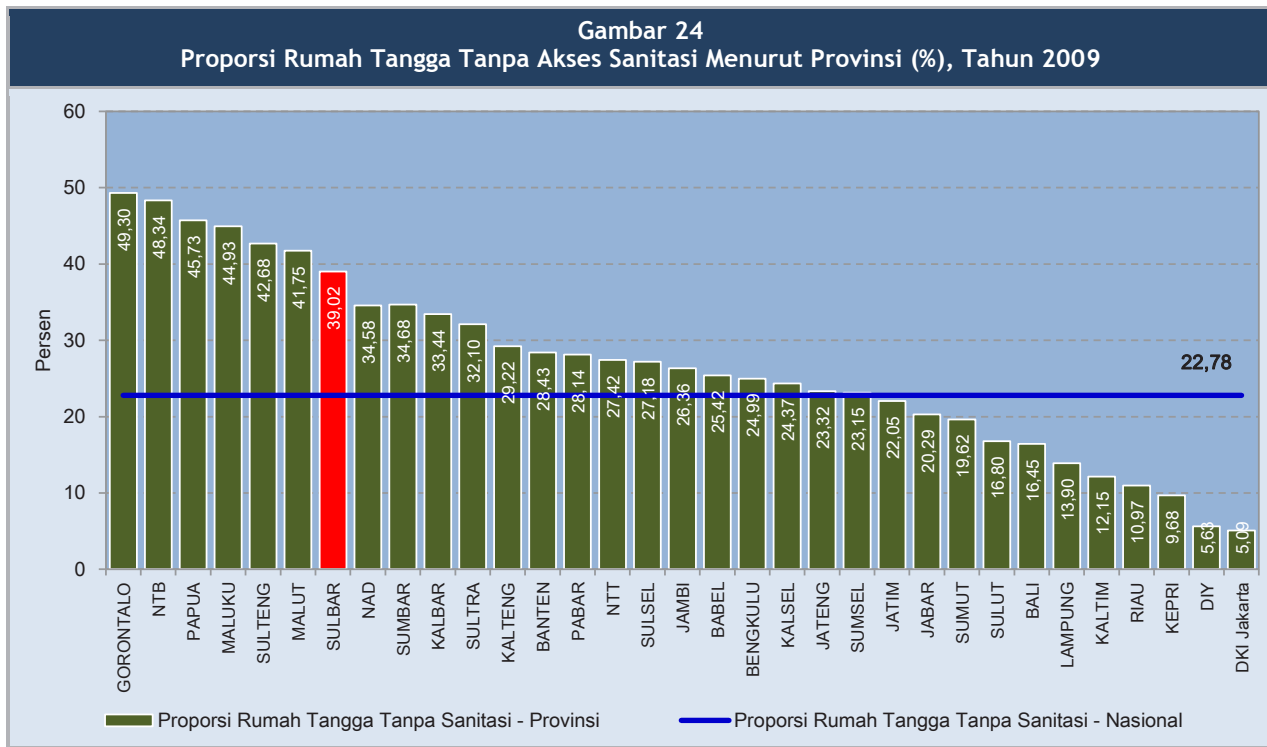
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



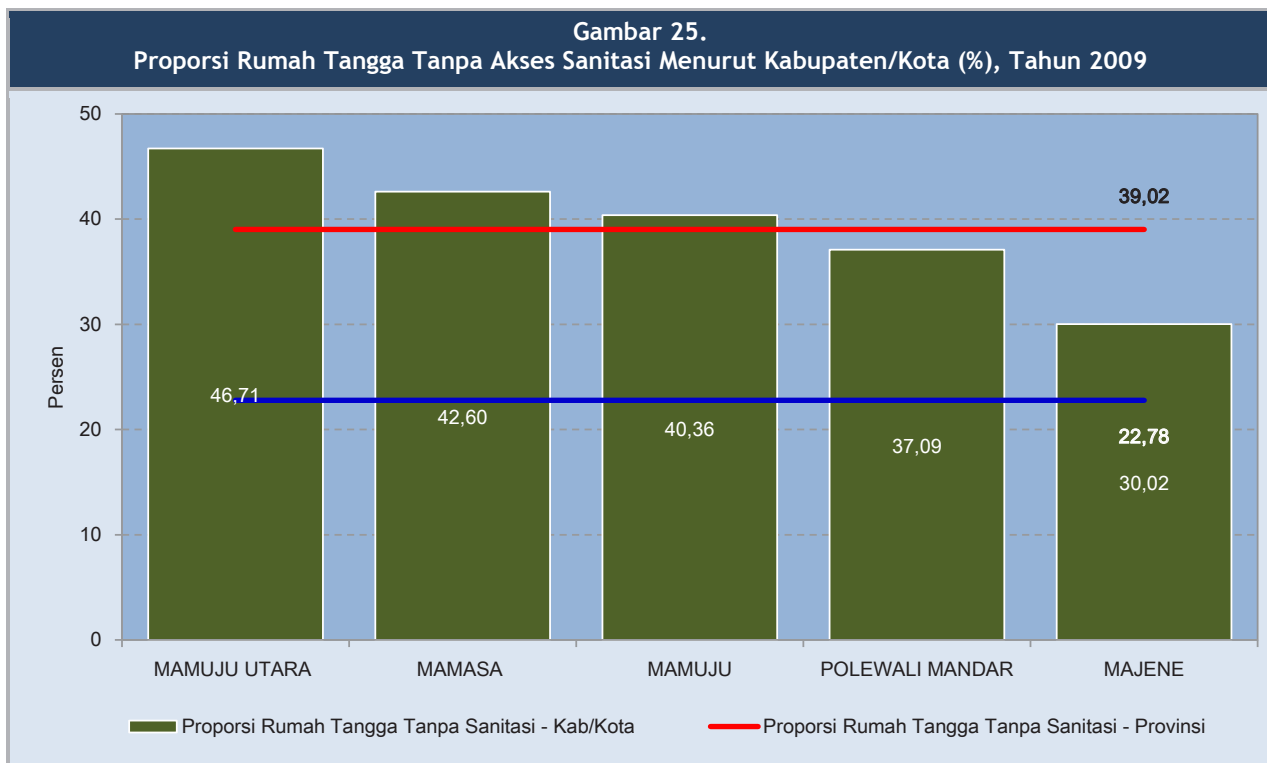
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

³ Akses terhadap air bersih dengan kontrol jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat

AKSES TERHADAP SANITASI

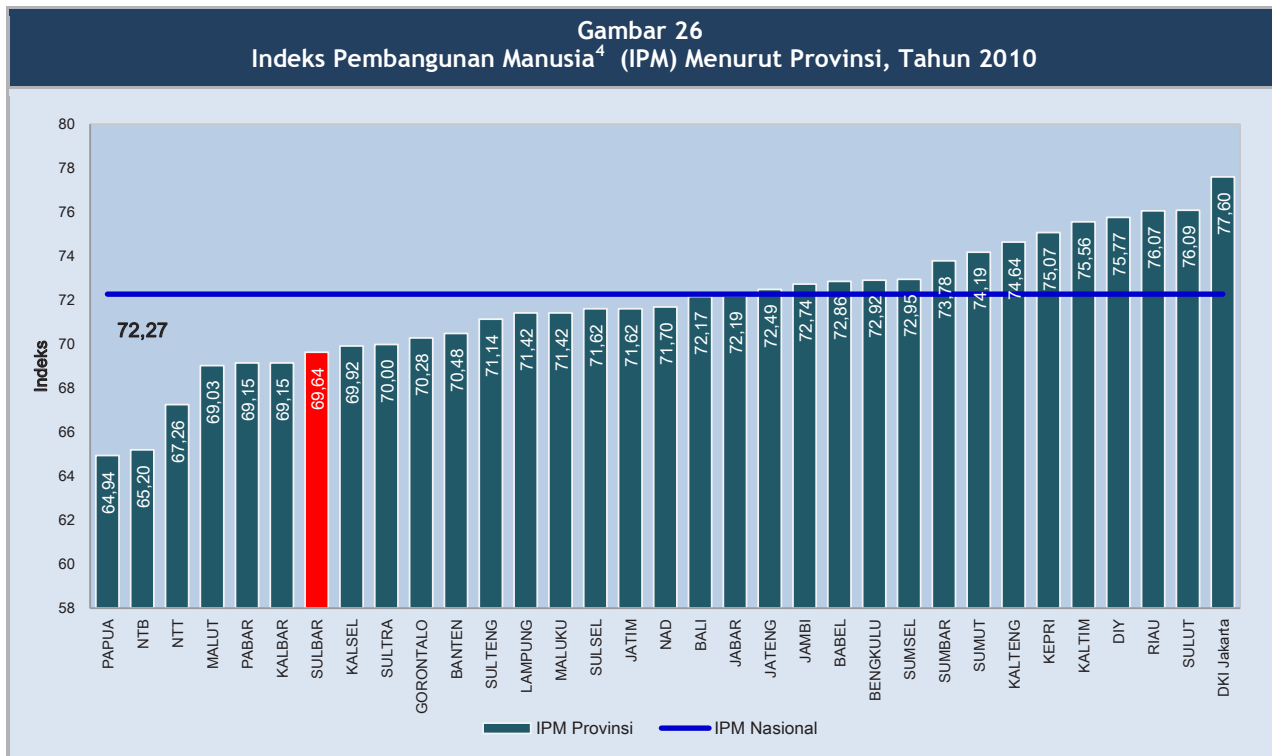


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

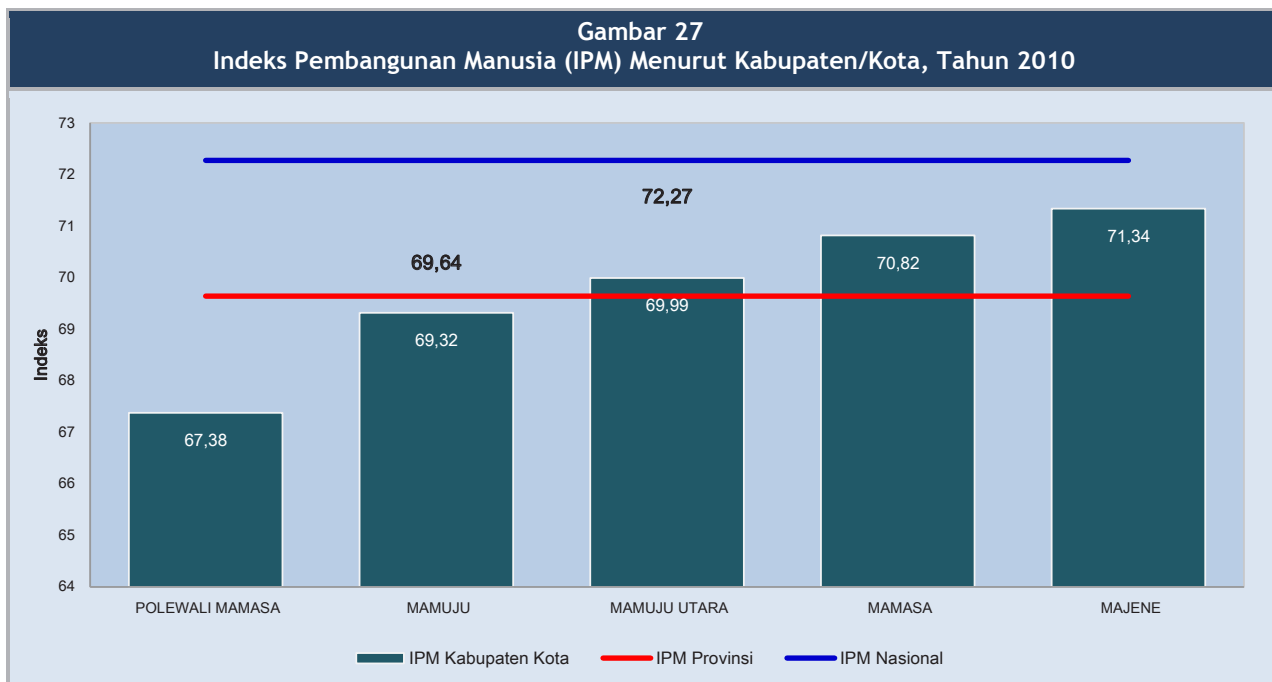


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

⁴ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran kesejahteraan dengan membandingkan antara harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. Ukuran kesejahteraan tersebut diperkenalkan dan diterbitkan oleh PBB dalam Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report) sejak tahun 1990.

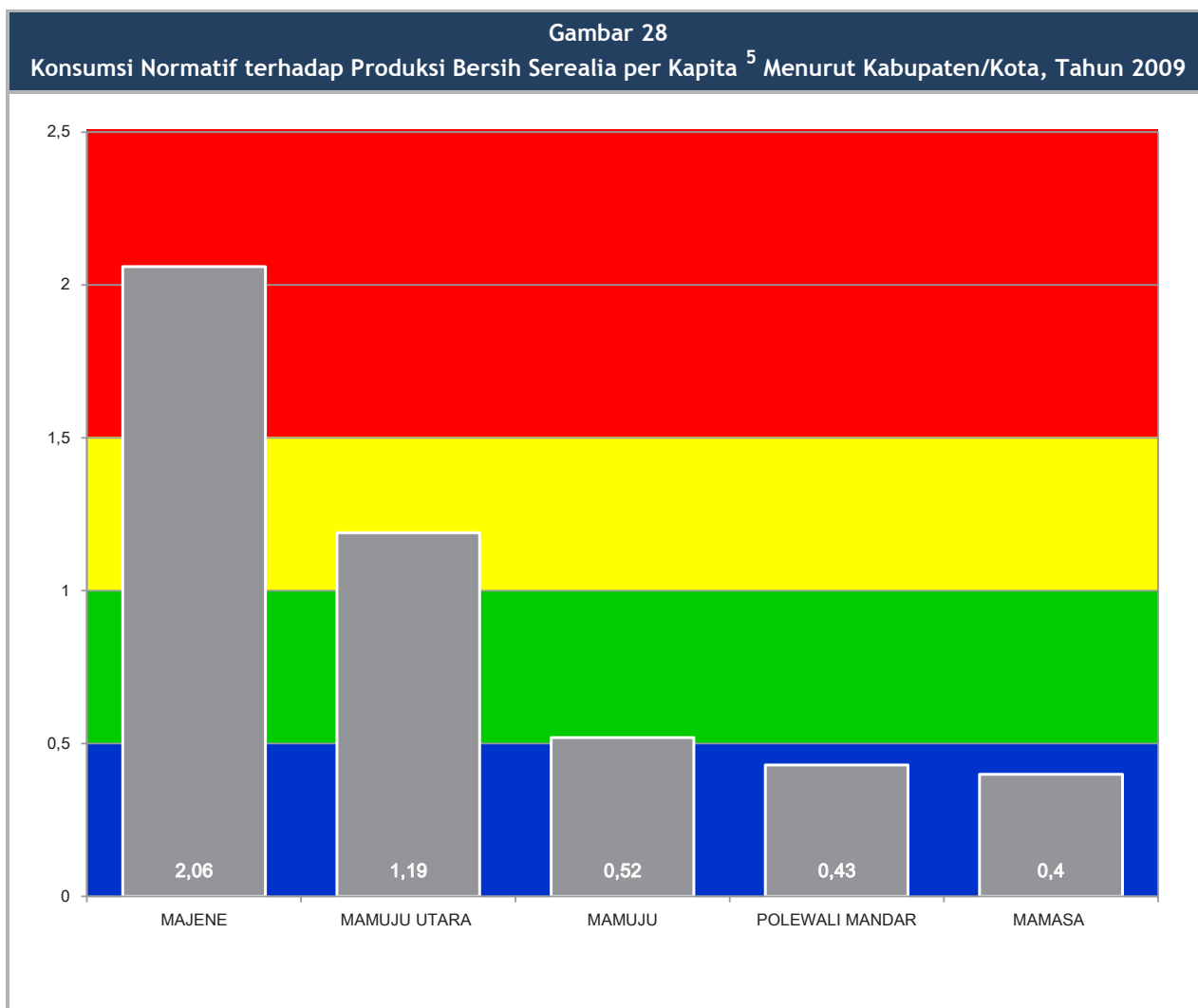
KOMPONEN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Tabel 9.
Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota,
Tahun 2009 dan 2010

Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran Per Kapita		IPM	
	(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)			
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
MAJENE	65,06	65,38	94,71	94,72	8,18	8,40	638,64	640,82	70,83	71,34
POLEWALI MAMASA	64,71	64,99	83,81	85,92	6,90	6,95	630,16	631,64	66,61	67,38
MAMASA	71,07	71,19	85,12	86,12	6,55	6,95	630,27	630,95	70,18	70,82
MAMUJU	68,26	68,51	89,08	89,18	6,79	7,00	620,08	621,51	68,89	69,32
MAMUJU UTARA	67,51	67,55	95,56	95,57	6,71	7,19	616,07	616,92	69,55	69,99
SULAWESI BARAT	67,60	67,80	87,59	88,48	7,05	7,11	630,32	631,76	69,18	69,64
INDONESIA	69,21	69,43	92,58	92,91	7,72	7,92	631,46	633,64	71,76	72,27

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

KETAHANAN PANGAN



Sumber: Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten, 2009 dan Sulawesi Barat Dalam Angka (BPS), 2010.

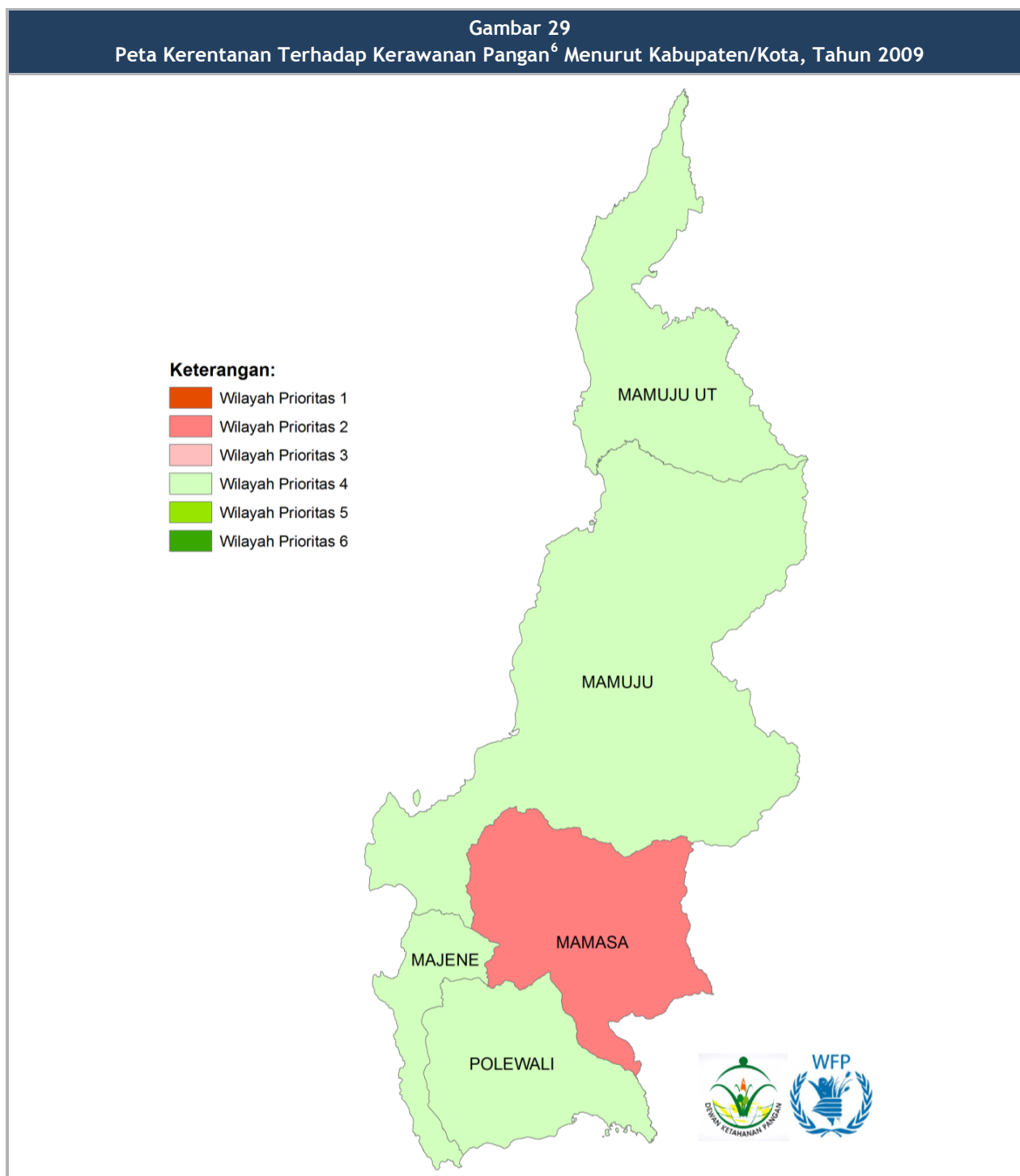
Keterangan:

- >1,5 Defisit Tinggi
- 1 – 1,5 Defisit Sedang
- 0,5 – 1 Surplus Rendah
- 0 – 0,5 Surplus Tinggi
- 0 Data Tidak Tersedia

⁵ Merupakan salah satu ukuran ketahanan pangan di tingkat Kabupaten dan Kota dan termasuk dalam Peta Kerawanan Pangan Indonesia (Food Insecurity Atlas-FIA) diperkenalkan oleh DKP, Badan Ketahanan Pangan provinsi dan kabupaten bekerja sama dengan World Food Programme (WFP) pada tahun 2005.

KETAHANAN PANGAN

Gambar 29
Peta Kerentanan Terhadap Kerawanan Pangan⁶ Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009



Sumber: Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian RI dan WFP, 2009

⁶ Pada tahun 2009, cakupan diperluas dari 30 provinsi di 265 kabupaten menjadi 32 provinsi dan 346 kabupaten serta merupakan konsolidasi berbagai aspek yang terkait dengan ketahanan pangan, seperti ketersediaan pangan, akses dan distribusi pangan serta gizi dan kesehatan yang dipublikasikan dengan nama “Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA)”

Tabel 10.
Komponen Indeks Komposit Ketahanan Pangan, Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Daerah	Ketersediaan Pangan		Akses Pangan			Akses terhadap Kesehatan dan Gizi					Indeks Komposit Ketahanan Pangan (CFSI - Composite Food Security Index)
	Produksi Bersih Serealia-Kab./Kota (Kg/kapita/hari)	Rasio Konsumsi Normatif-Kab./Kota	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Non Elektrifikasi	Desa tanpa Akses ke Jalan (%)	Angka Buta Huruf Perempuan (%)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (%)	Penduduk tanpa akses pada fasilitas sarana kesehatan (%)	Penduduk tanpa akses pada air bersih* (%)	
	2009	2009	2009	2008	2008	2009	2009	2007	2008	2009	
MAJENE	146	2.06	18.09	37.15	0.00	9.51	65.06	22.4	2.50	34.48	153.1
POLEWALI MANDAR	702	0.43	21.37	34.10	0.00	18.86	64.71	28.1	12.78	40.10	307.8
MAMASA	759	0.4	17.87	54.63	0.00	16.39	71.07	45.8	15.25	89.97	522.3
MAMUJU	578	0.52	8.13	47.94	1.63	14.88	68.26	27.6	6.50	55.03	237.1
MAMUJU UTARA	252	1.19	6.47	39.38	0.00	12.33	67.51	42.7	14.29	61.24	434.2

Sumber: Badan Pusat Statistik 2011, Dewan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian RI dan WFP, 2009.

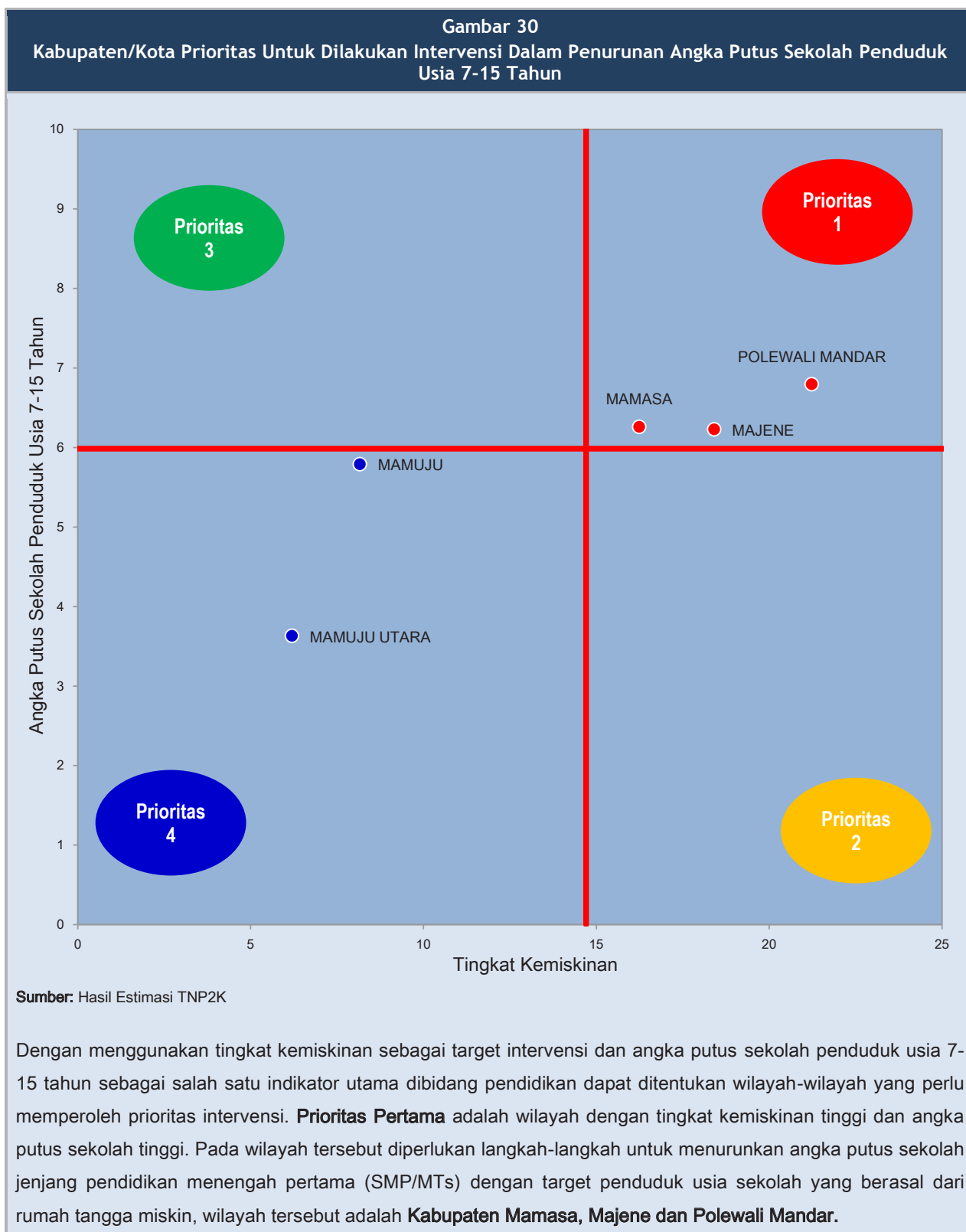
Keterangan:

*Air Bersih dihitung dengan menggunakan kontrol jarak dari tempat pembuangan kotoran/limbah

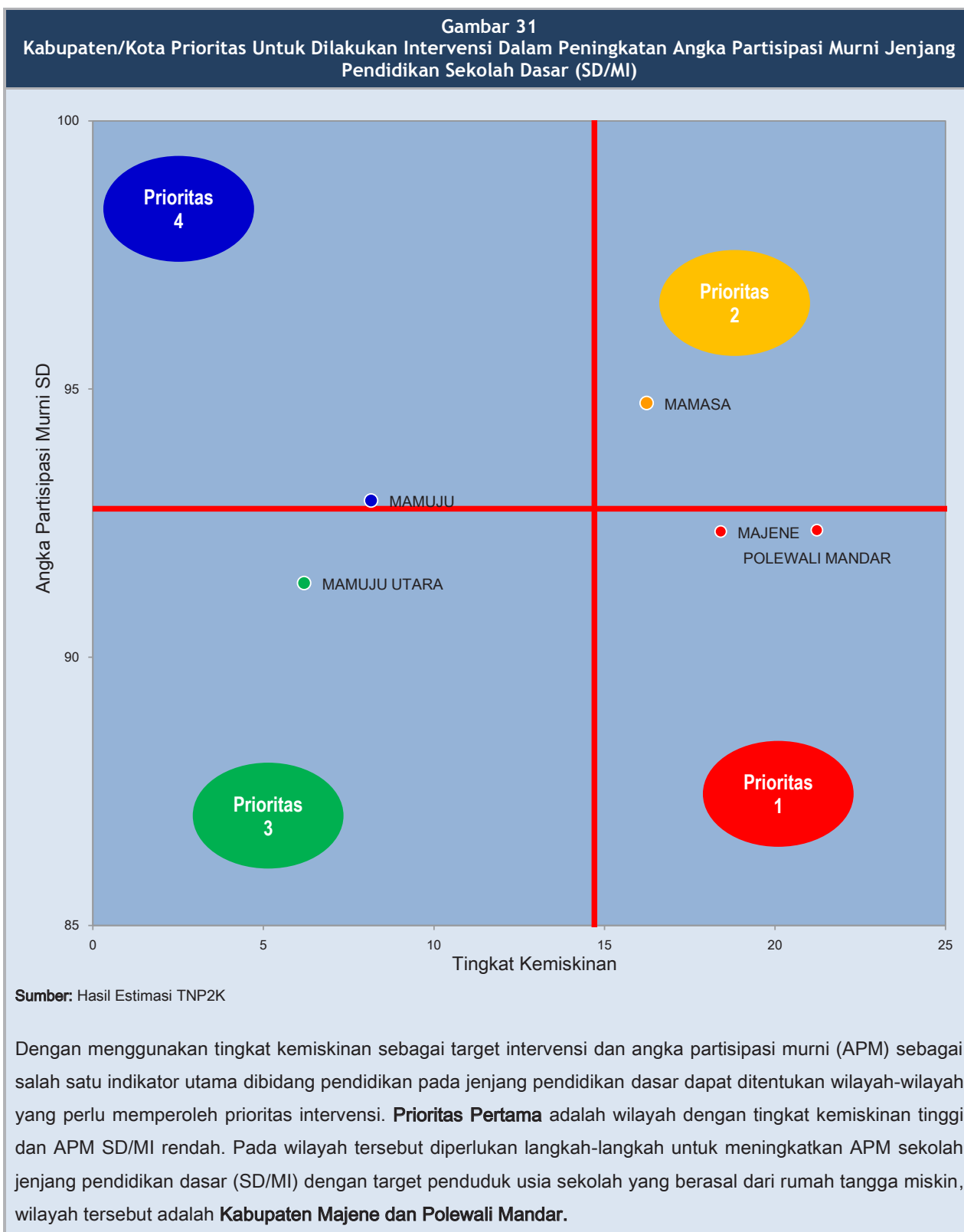
** Terdapat beberapa komponen dari Indeks Komposit Ketahanan Pangan (CFSI -Composite Food Security Index) yang tidak dihitung karena belum terdata secara lengkap.

*** Data tidak tersedia (wilayah pemekaran).

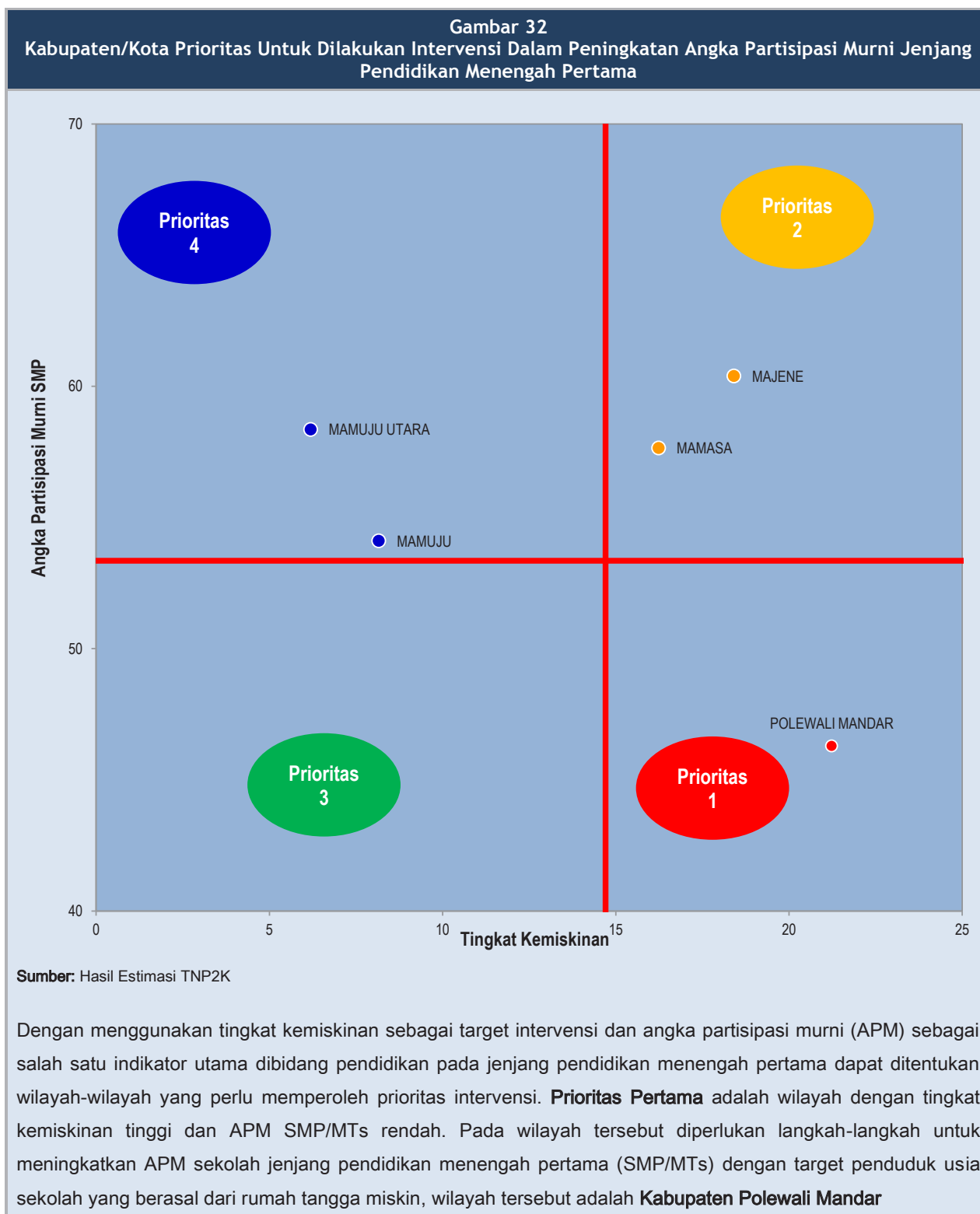
PRIORITAS BIDANG PENDIDIKAN



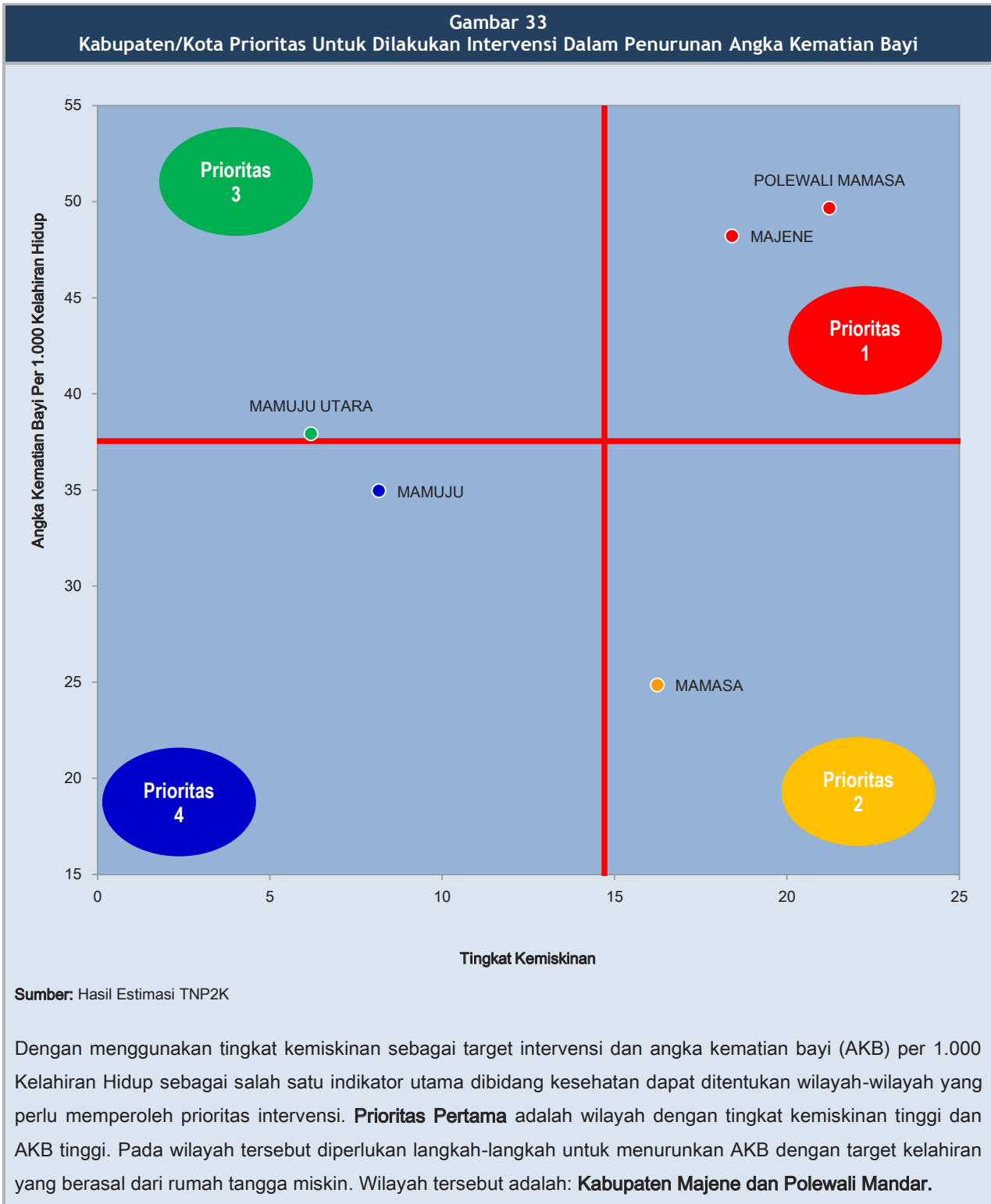
PRIORITAS BIDANG PENDIDIKAN



PRIORITAS BIDANG PENDIDIKAN



PRIORITAS BIDANG KESEHATAN

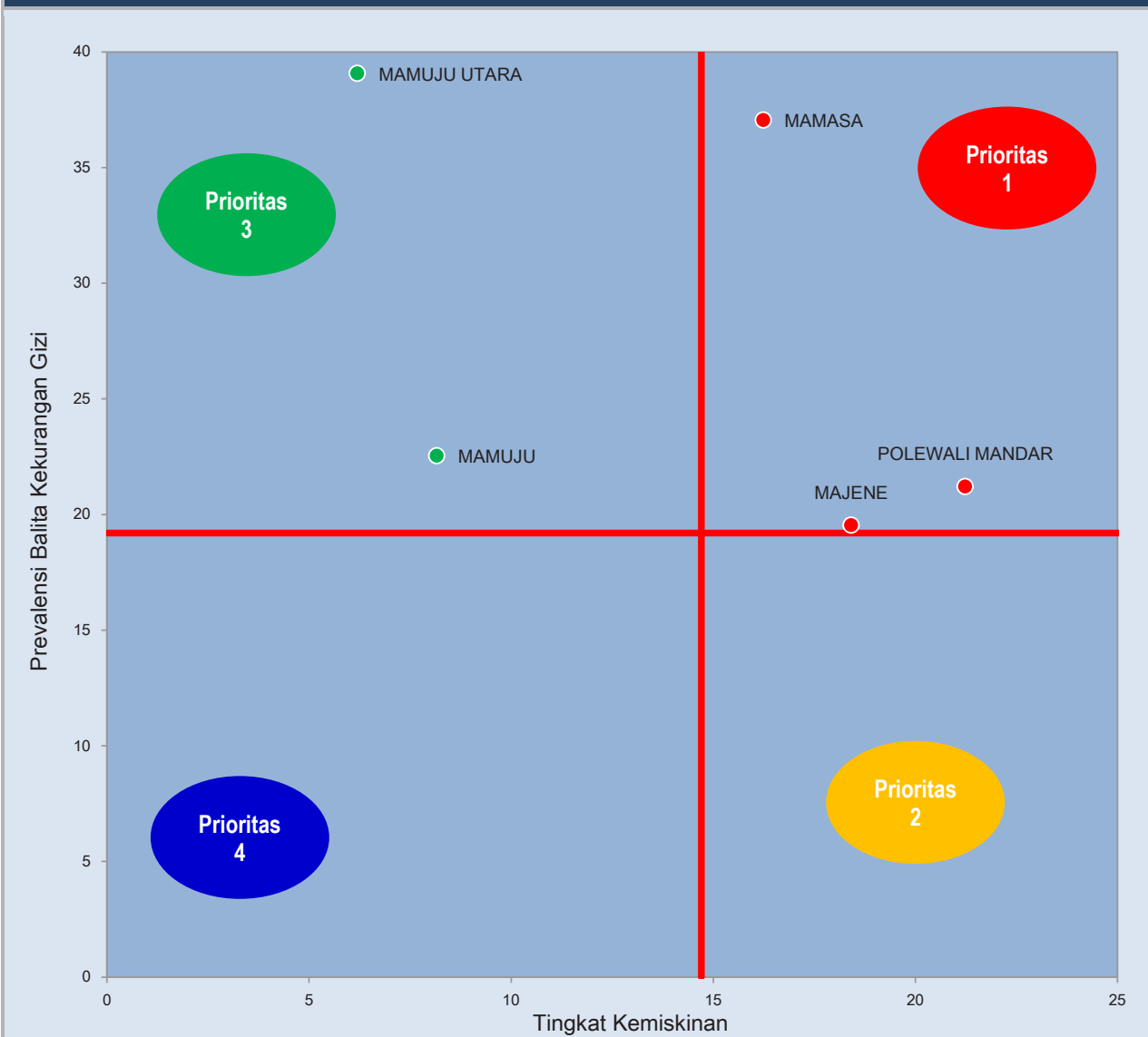


Sumber: Hasil Estimasi TNP2K

Dengan menggunakan tingkat kemiskinan sebagai target intervensi dan angka kematian bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup sebagai salah satu indikator utama dibidang kesehatan dapat ditentukan wilayah-wilayah yang perlu memperoleh prioritas intervensi. **Prioritas Pertama** adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan AKB tinggi. Pada wilayah tersebut diperlukan langkah-langkah untuk menurunkan AKB dengan target kelahiran yang berasal dari rumah tangga miskin. Wilayah tersebut adalah: **Kabupaten Majene dan Polewali Mandar**.

PRIORITAS BIDANG KESEHATAN

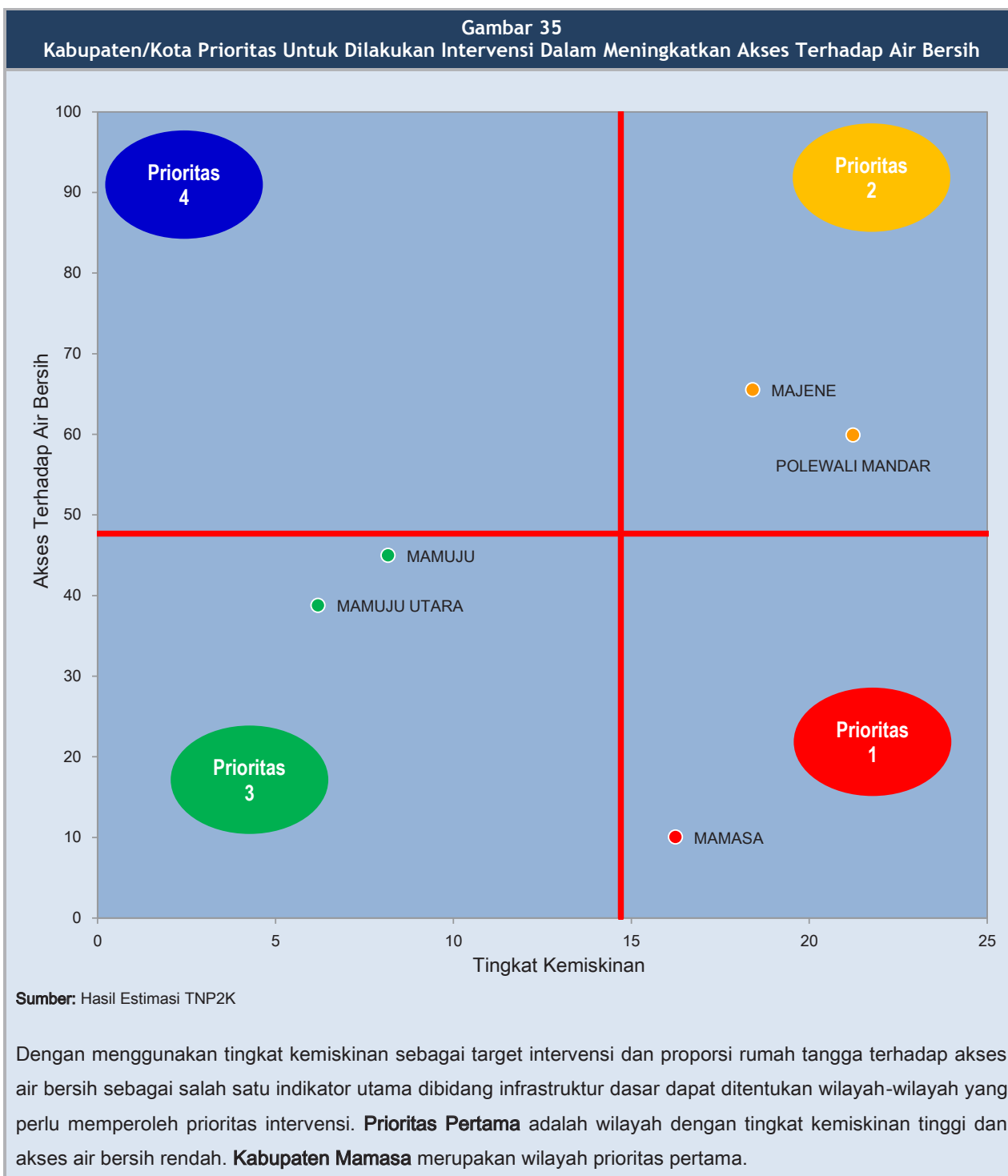
Gambar 34
Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Penurunan Prevalensi Balita Kekurangan Gizi



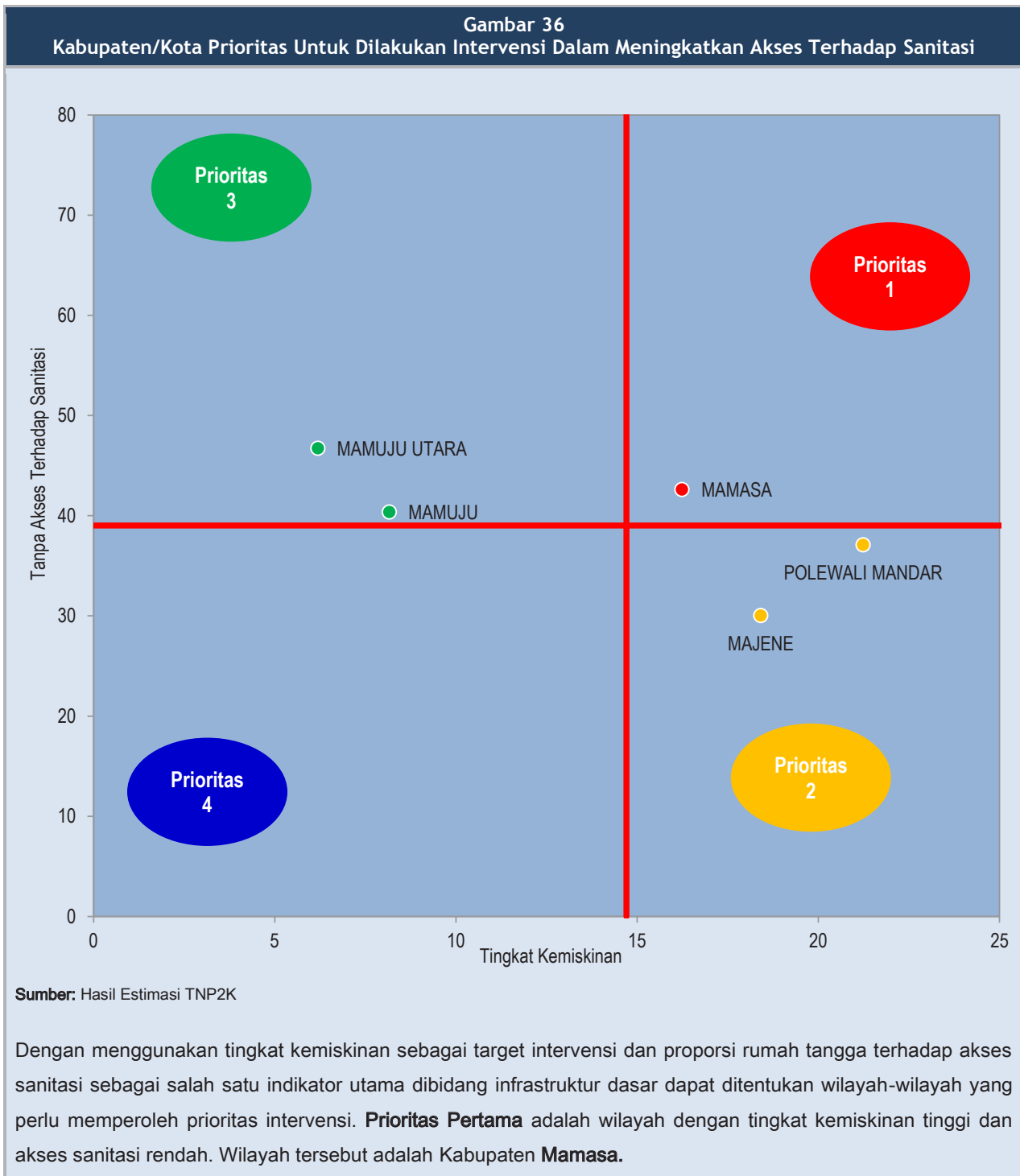
Sumber: Hasil Estimasi TNP2K

Dengan menggunakan tingkat kemiskinan sebagai target intervensi dan prevalensi balita kekurangan gizi sebagai salah satu indikator utama dibidang kesehatan dapat ditentukan wilayah-wilayah yang perlu memperoleh prioritas intervensi. **Prioritas Pertama** adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan prevalensi balita kekurangan gizi tinggi. Pada wilayah tersebut diperlukan langkah-langkah untuk menurunkan prevalensi balita kekurangan gizi dengan target balita yang berasal dari rumah tangga miskin. Wilayah-wilayah tersebut diantaranya adalah: **Kabupaten Majene, Mamasa dan Polewali Mandar.**

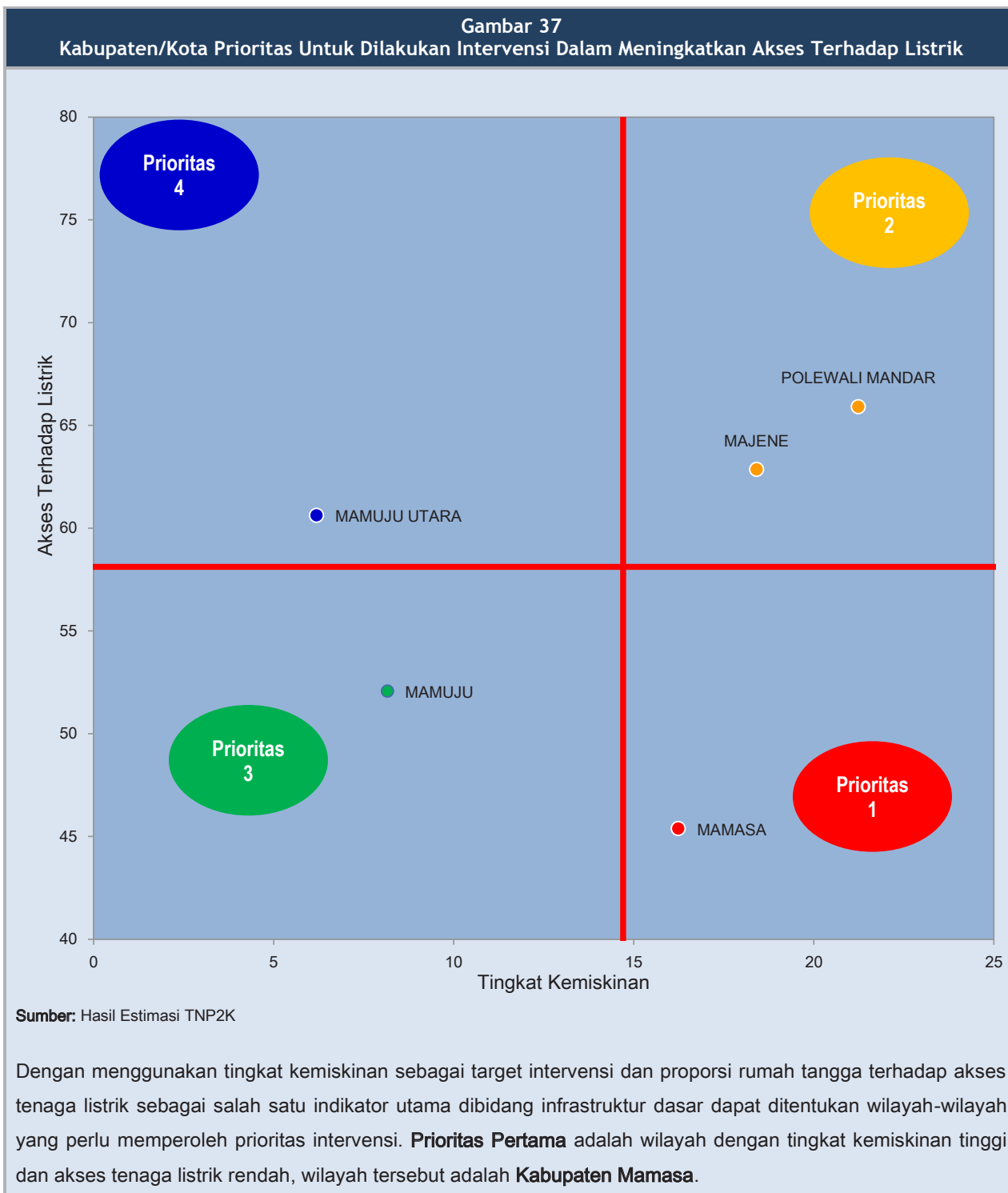
PRIORITAS BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR



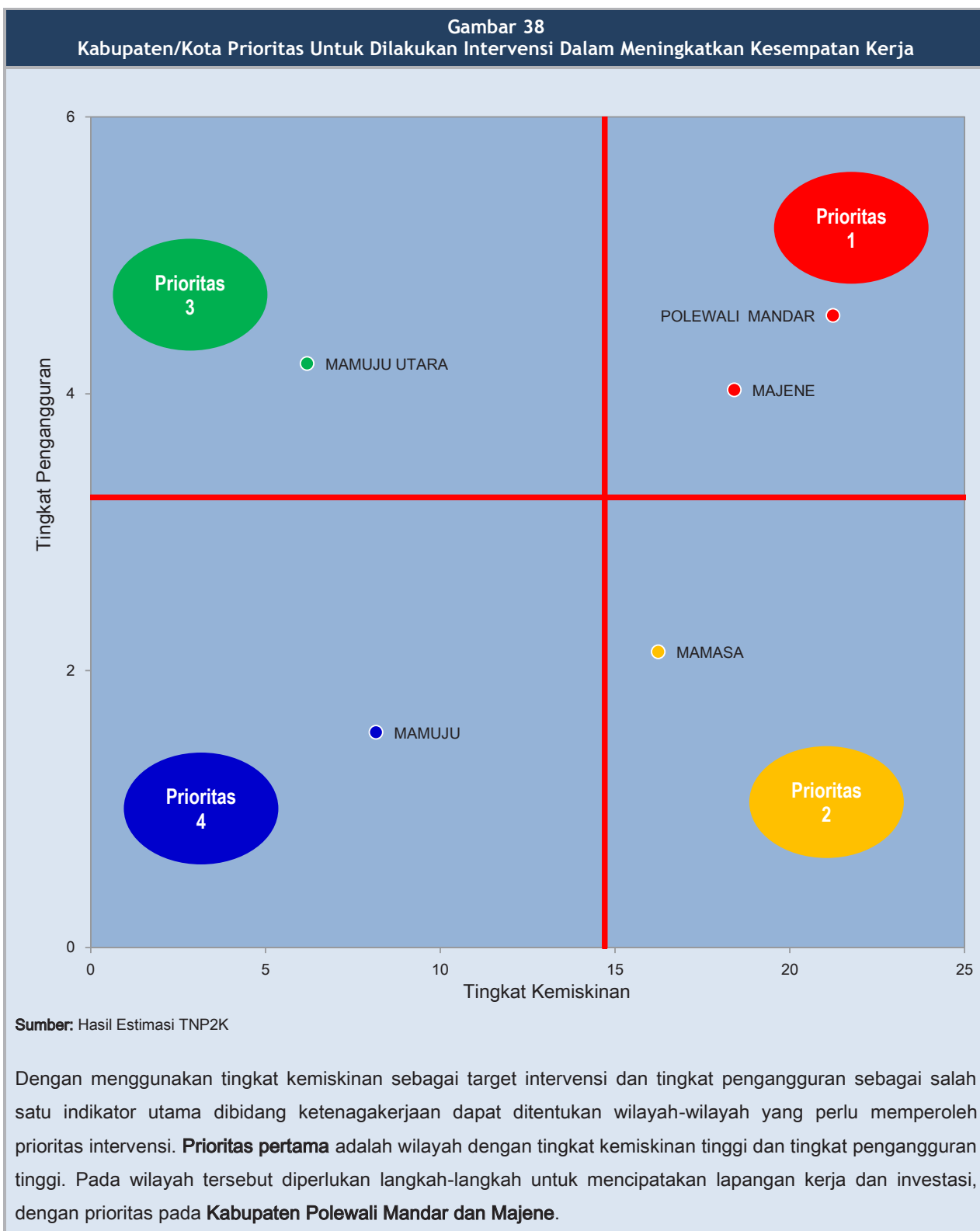
PRIORITAS BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR



PRIORITAS BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR



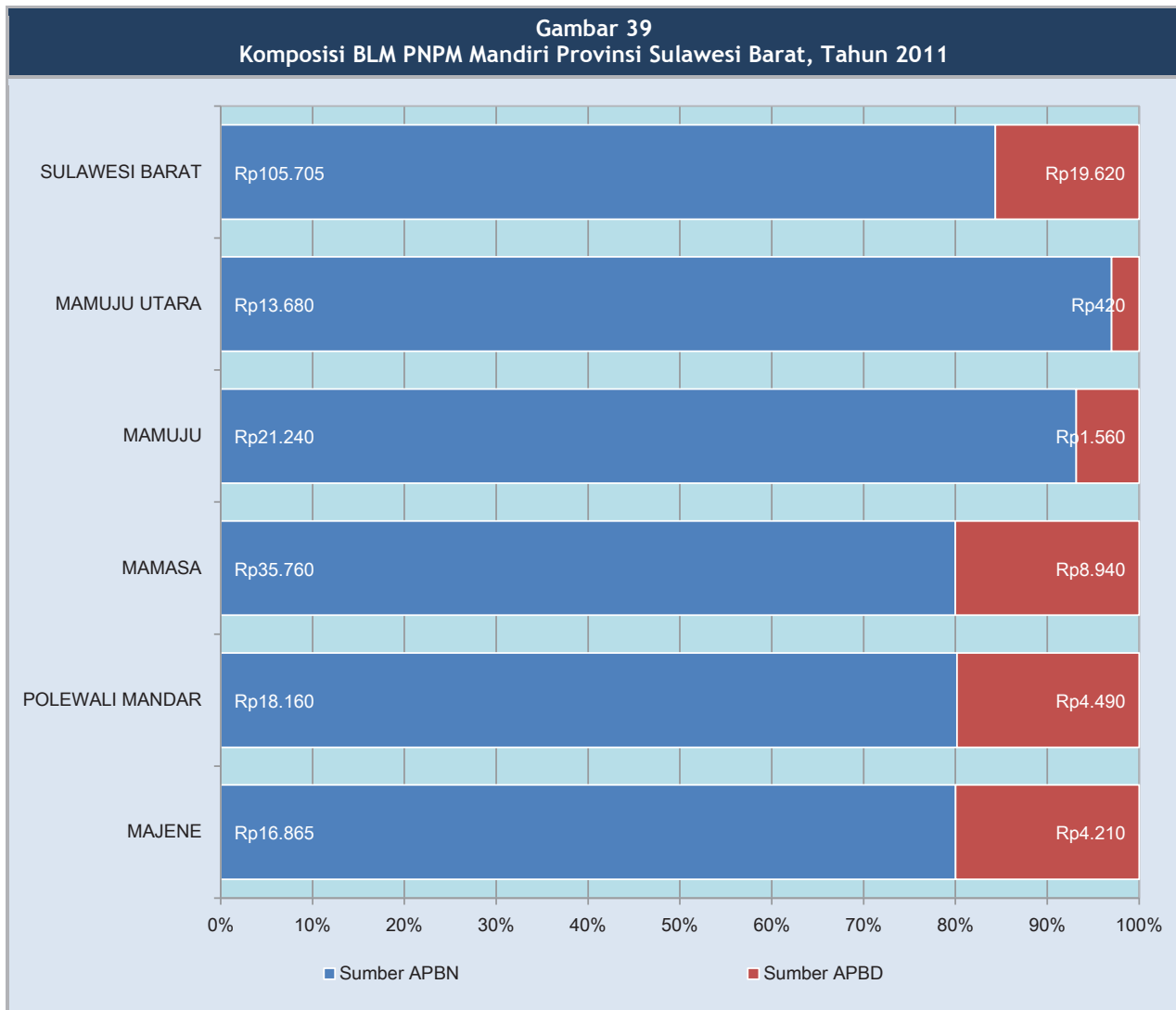
PRIORITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN



BIDANG-BIDANG PRIORITAS KESEJAHTERAAN RAKYAT

Tabel 11
Prioritas Intervensi Menurut Kabupaten Kota

Kabupaten/Kota	Angka Putus Sekolah Usia 7-15 Th	Angka Partisipasi Murni SD/MI	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	AKB Per 1.000 Kelahiran Hidup	Prevalensi Balita Kurang Gizi	Akses Terhadap Air Bersih	Akses Terhadap Sanitasi	Akses Terhadap Listrik	Tingkat Pengang-guran
POLEWALI MANDAR	1	1	1	1	1	2	2	2	1
MAJENE	1	1	2	1	1	2	2	2	1
MAMASA	1	2	2	2	1	1	1	1	2
MAMUJU UTARA	4	3	4	3	3	3	3	4	3
MAMUJU	4	4	4	4	3	3	3	3	4



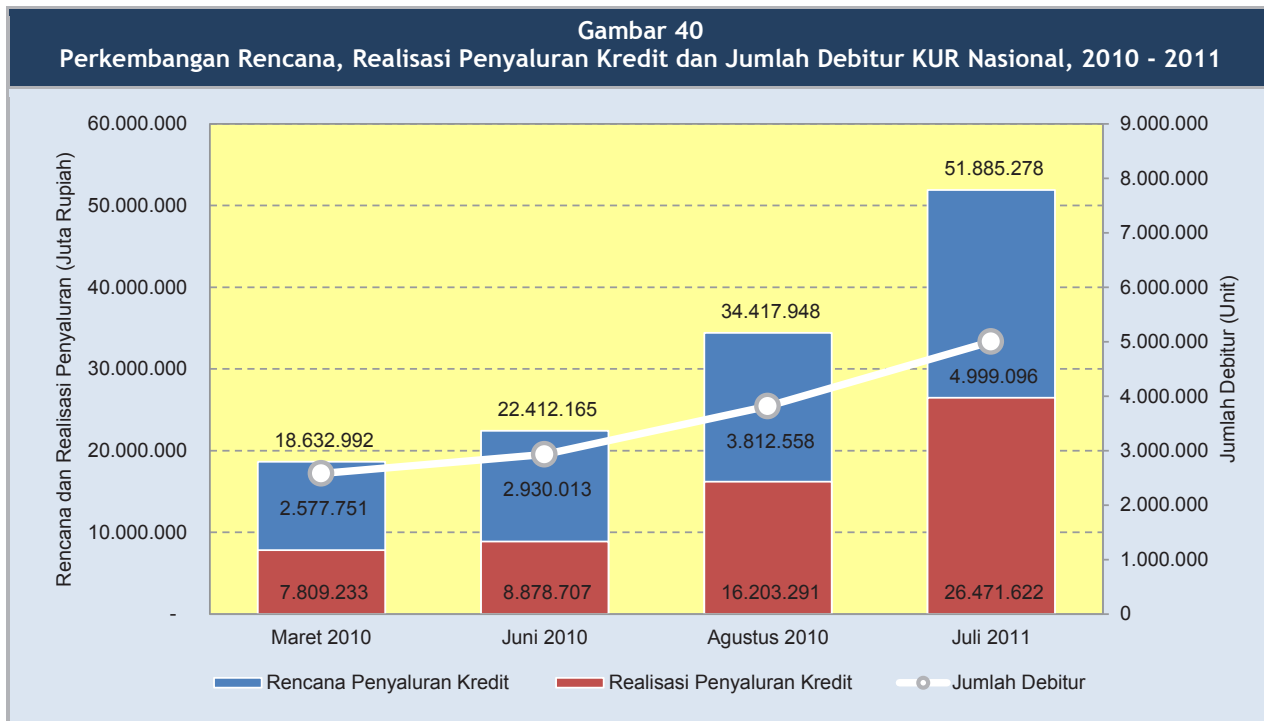
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2011.

Tabel 12.
Komposisi BLM PNPM Mandiri Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2011

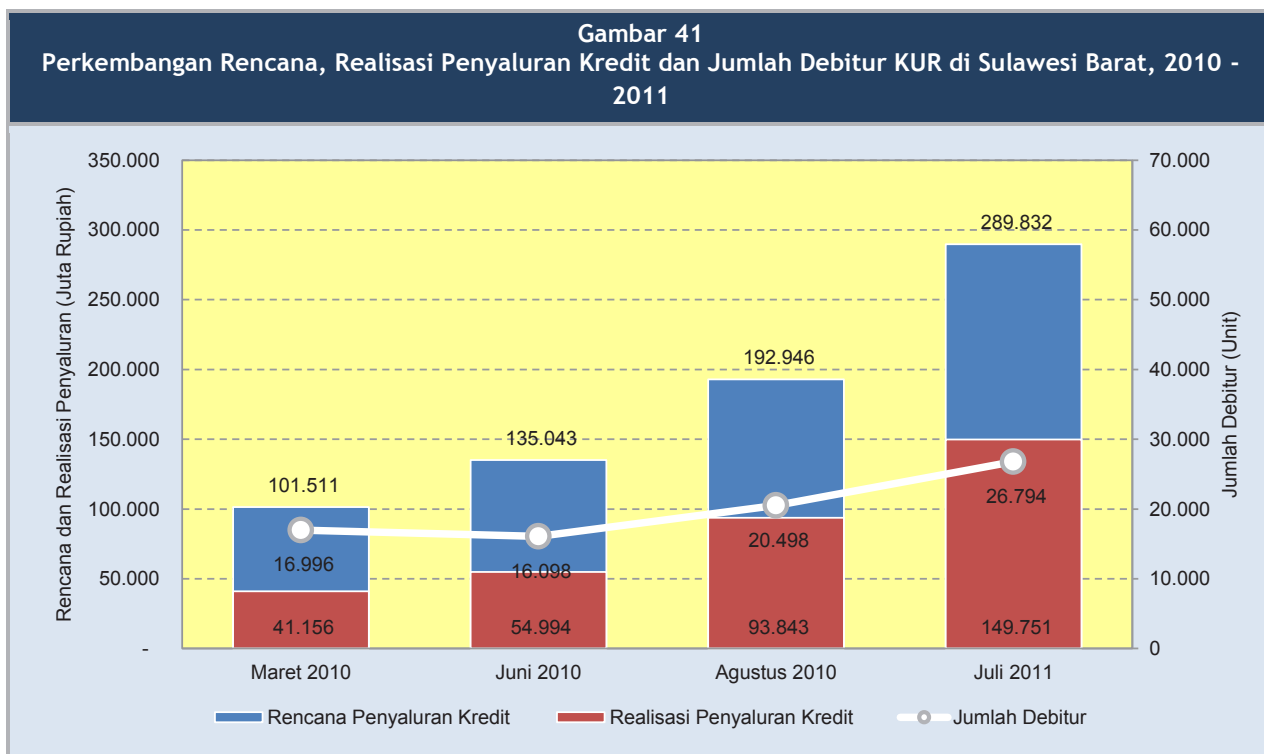
Daerah	PNPM Perdesaan	PNPM Perkotaan	PNPM PISEW	Total Alokasi BLM	Sumber APBN	Sumber APBD	Jumlah Kecamatan
	Juta Rp	Juta Rp	Juta Rp	Juta Rp	Juta Rp	Juta Rp	Kec.
MAJENE	20.250	825		21.075	16.865	4.210	8
POLEWALI MANDAR	22.350	300		22.650	18.160	4.490	16
MAMASA	44.700			44.700	35.760	8.940	18
MAMUJU	7.800		15.000	22.800	21.240	1.560	15
MAMUJU UTARA	2.100		12.000	14.100	13.680	420	12
SULAWESI BARAT	97.200	1.125	27.000	125.325	105.705	19.620	69

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2011.

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

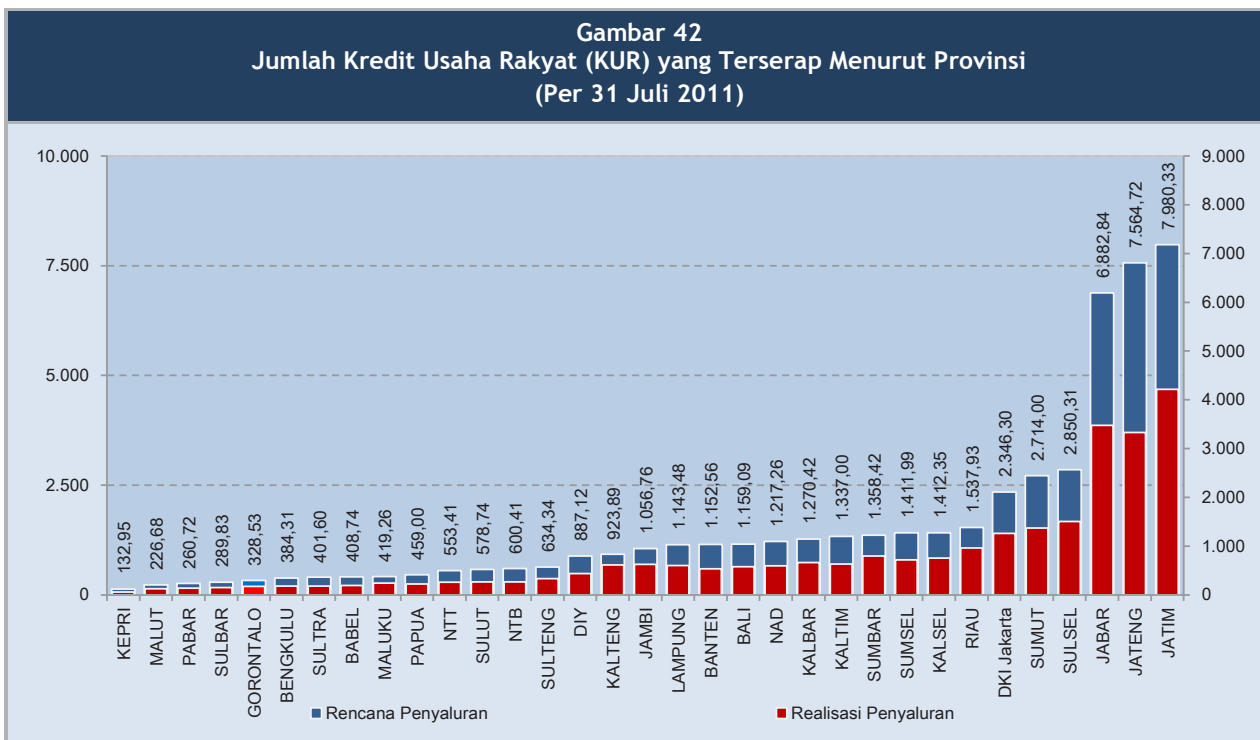


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

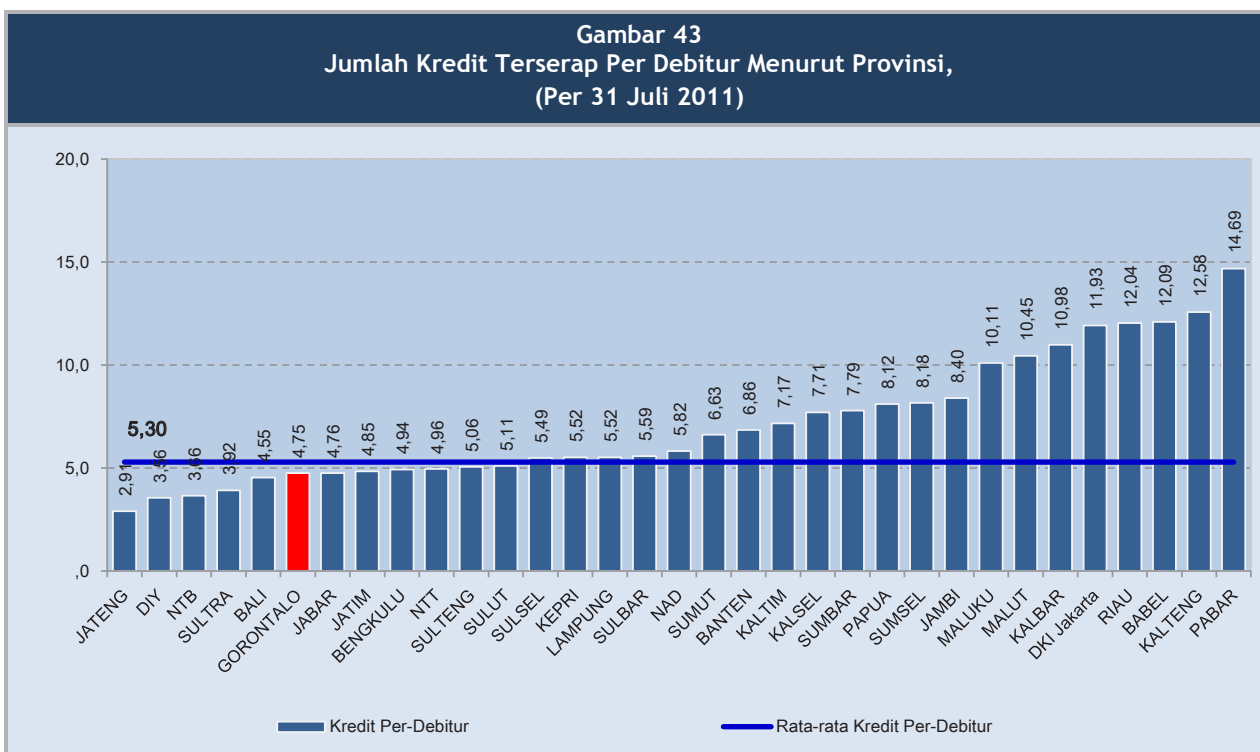


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

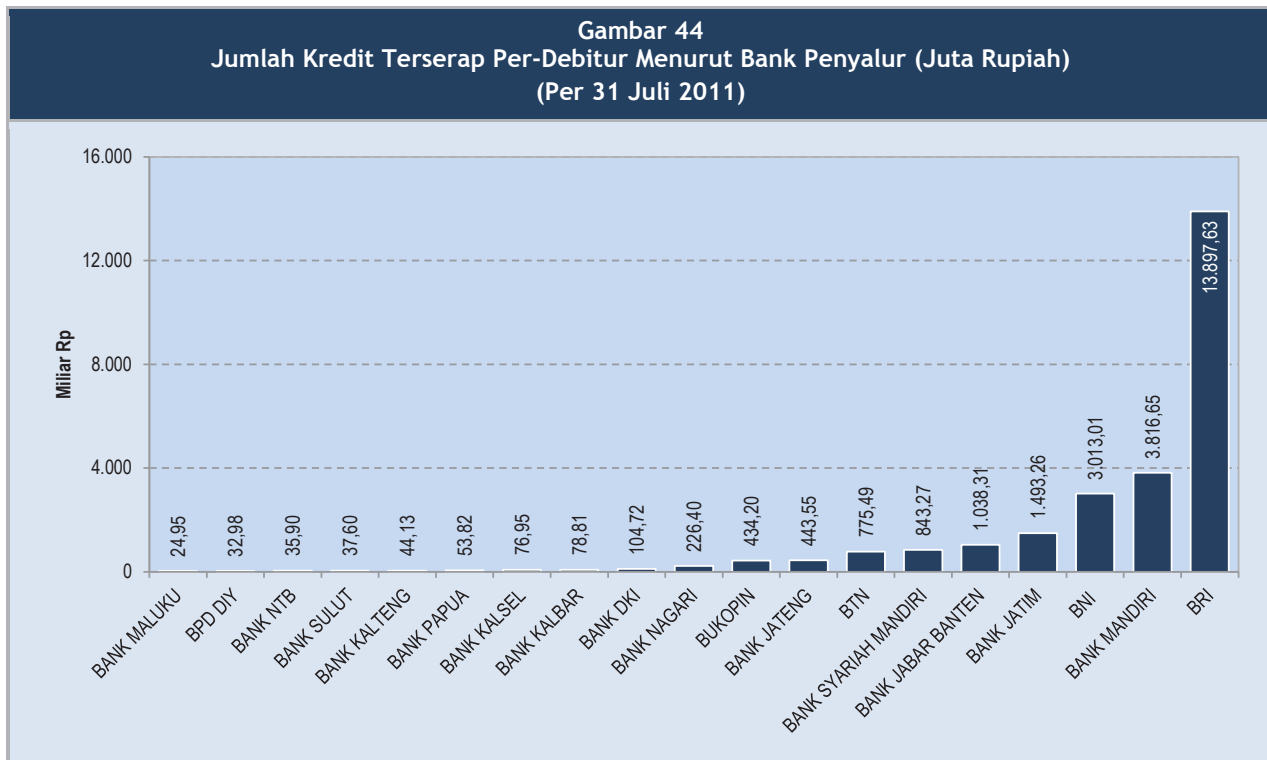


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

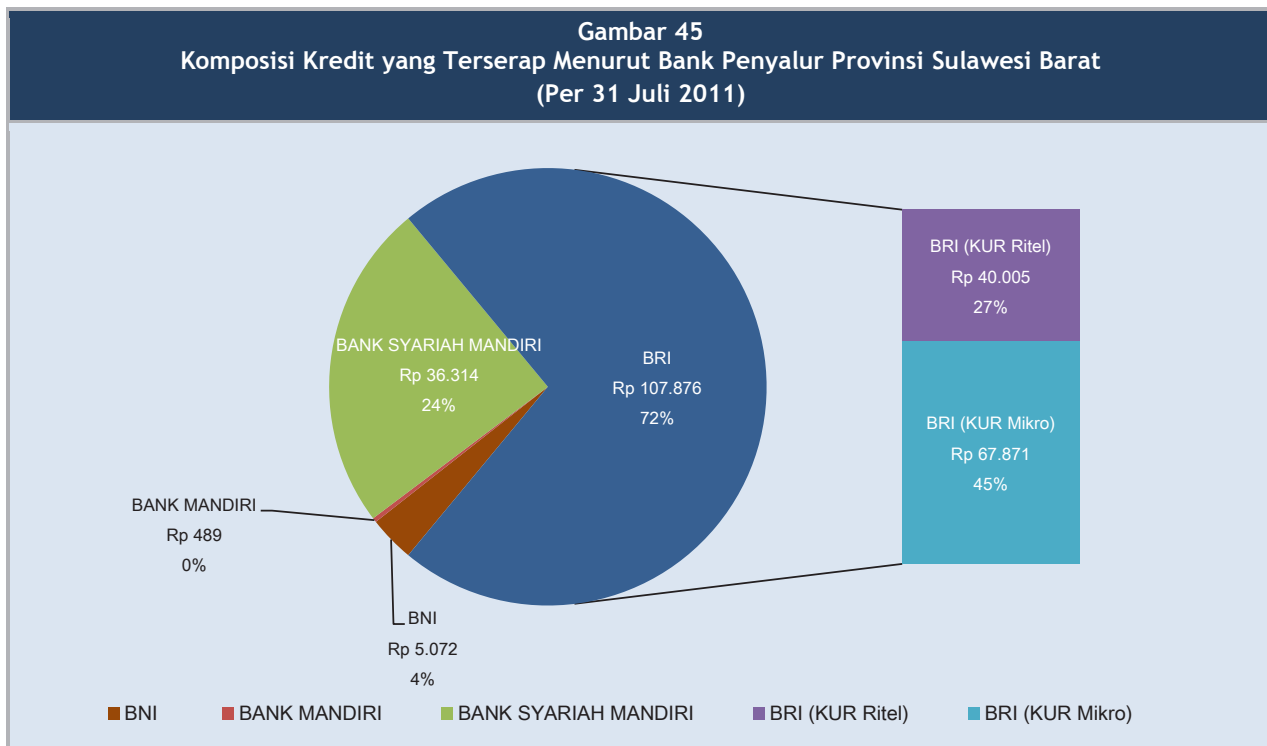


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

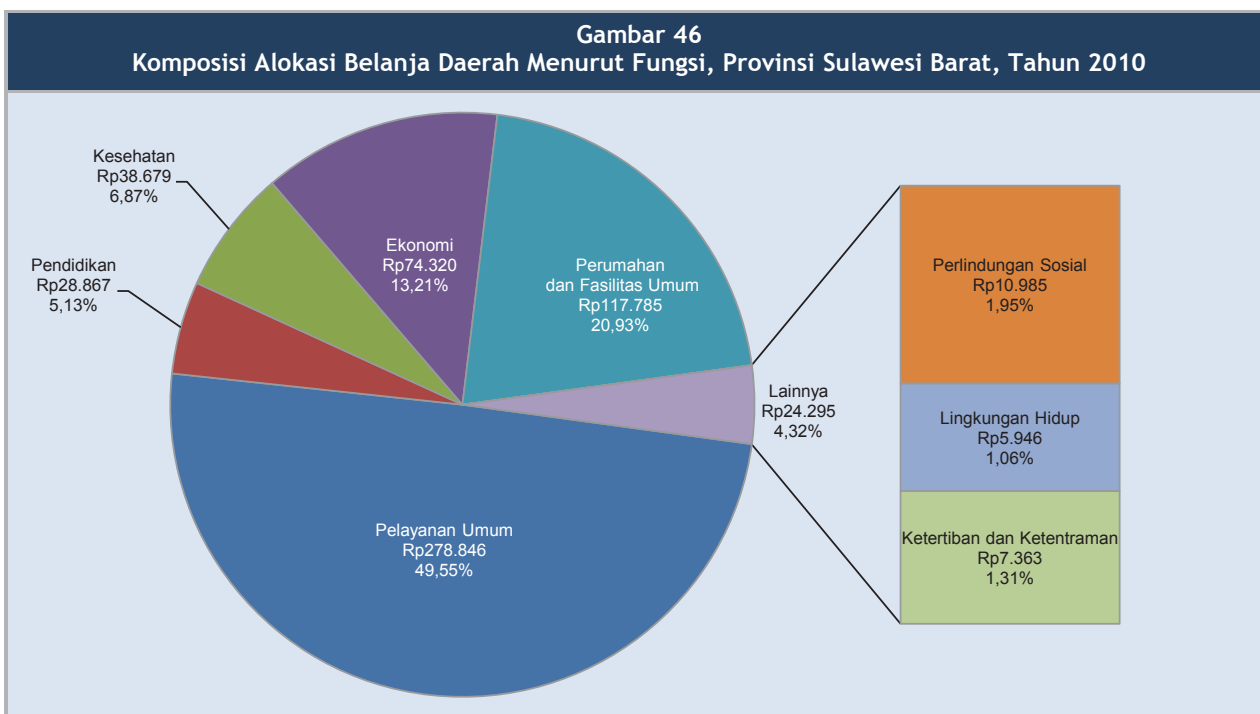


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

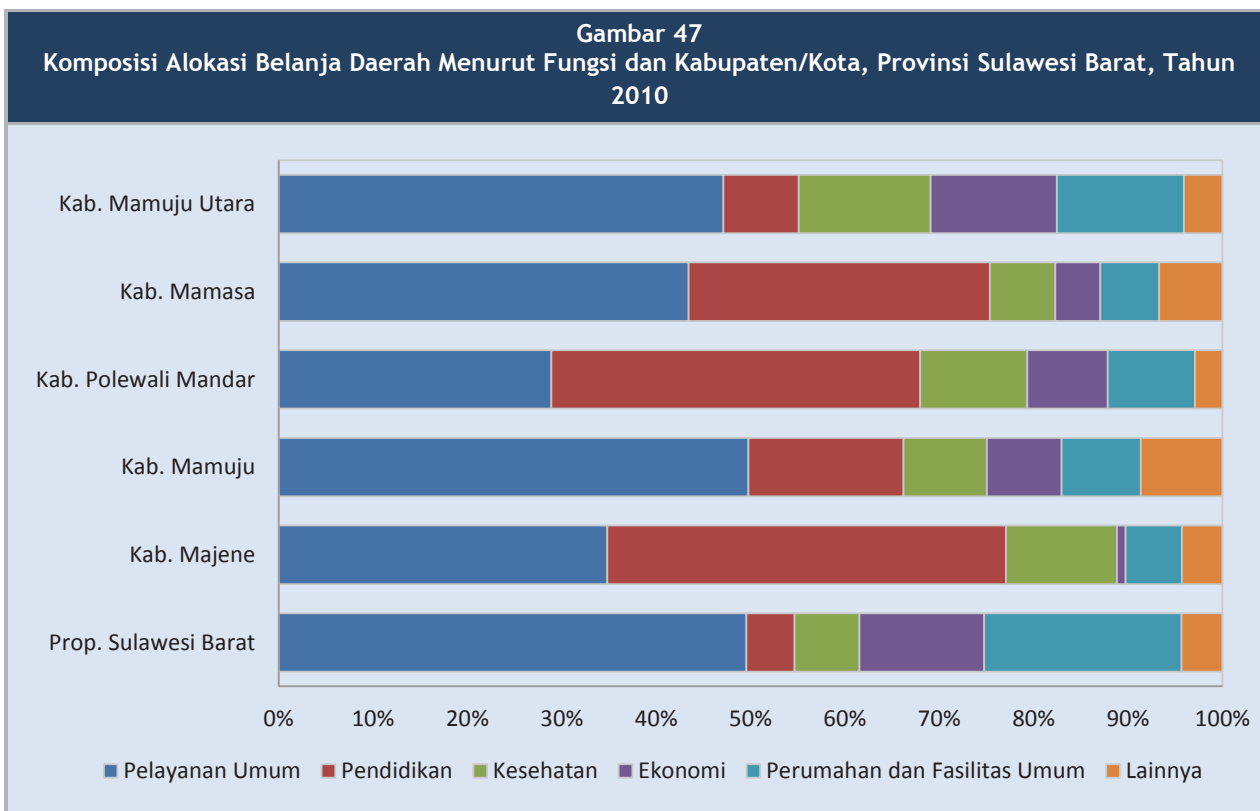


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH



Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2010



Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2010